

**STATISTIK KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 2004-2007**  
*Financial Statistics of Province Government 2004-2007*

**ISSN.**

**No. Publikasi / Publication Number : 06310.0802**

**Katalog BPS / BPS Catalogue : 7203.002**

**Ukuran Buku / Book Size : 21 Cm X 28 Cm**

**Jumlah Halaman / Number of Pages : 140 halaman / pages**

**Naskah / Manuscript :**

**Subdirektorat Statistik Keuangan**

*Financial Statistics Subdirectorate*

**Gambar Kulit / Cover design :**

**Subdirektorat Publikasi Statistik**

*Statistical Publication Subdirectorate*

**Diterbitkan oleh / Published by :**

**Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia**

*BPS – Statistics Indonesia*

**Dicetak oleh / Printed by :**

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya**

*May be cited with reference to the source*

**STATISTIK KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH PROPINSI 2004-2007**

Anggota Tim Penyusun :

Koordinator : Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc.

Editor : Wikaningsih, SE  
Agus Nuwibowo, S.Si

Penulis : Hasan As'ari, S.Si, ME

Pengolah Data : Suhartati  
Epi Ernaprijatna  
Ahmad Saifullah

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Data keuangan daerah provinsi dikumpulkan dari kantor Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia melalui BPS masing-masing Provinsi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) pemerintah daerah provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2004-2006. Selain data realisasi, publikasi ini memuat pula data tentang APBD pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2007.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Kritik dan saran dari pengguna data untuk menyempurnakan penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.

Jakarta, Oktober 2008  
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Rusman Heriawan  
NIP. 340003999

## KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Keuangan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Data keuangan daerah provinsi dikumpulkan dari kantor Pemerintah Daerah Provinsi seluruh Indonesia melalui BPS masing-masing Provinsi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) pemerintah daerah provinsi yang merupakan hasil perhitungan APBD periode tahun anggaran 2004-2006. Selain data realisasi, publikasi ini memuat pula data tentang APBD pemerintah daerah provinsi tahun anggaran 2007.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan.

Kritik dan saran dari pengguna data untuk menyempurnakan penerbitan selanjutnya, kami terima dengan hati terbuka.

Jakarta, Oktober 2008  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan

NIP. 340003999

## DAFTAR ISI/CONTENTS

	<u>HALAMAN</u>
	<b>PAGE</b>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i> .....	iii
Daftar Isi/ <i>Contents</i> .....	v
I. Penjelasan Umum/ <i>General Explanation</i> .....	vii
II. Uraian Ringkas/ <i>Brief Description</i> .....	xviii

### TABEL

#### **TABLE**

1. Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Receipt and Expenditure Throughout Indonesia 2004-2007</i> .....	3
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan / <i>Actual Local Provincial Government Receipts Throughout Indonesia by Receipt Items 2004-2007</i> .....	9
3A. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Revenue Throughout Indonesia 2004-2007</i> .....	45
3B. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Financing Receipt Throughout Indonesia 2004-2007</i> .....	57

## DAFTAR ISI/CONTENTS

<u>TABEL</u>	<u>HALAMAN</u>
<i>TABLE</i>	<i>PAGE</i>
4. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran / <i>Actual Local Provincial Government Expenditure Throughout Indonesia by Kind of Expenditure 2004-2007</i> .....	61
5A. Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Indirect Expenditure Throughout Indonesia 2004-2007</i> .....	97
5B. Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Direct Expenditure Throughout Indonesia 2004-2007</i> ...	107
5C. Realisasi Belanja Pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia / <i>Actual Local Provincial Government Financing Expenditure Throughout Indonesia 2004-2007</i> .....	110

## **I. PENJELASAN UMUM**

### **I.1. Pendahuluan**

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi secara umum menyajikan data tentang Penerimaan dan Pengeluaran seluruh Pemda Provinsi di Indonesia selama empat periode tahun anggaran.

Beberapa indikator/informasi penting yang dapat diperoleh dari Statistik Keuangan Pemda Provinsi ini, antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemda Provinsi.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan untuk masing-masing daerah, untuk mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan kata lain Publikasi Statistik Keuangan Pemda Provinsi dapat digunakan sebagai indikator atau informasi tentang potensi dan kemampuan dari masing-masing daerah provinsi dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

### **I.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data**

Data Statistik Keuangan Pemda Provinsi diperoleh dari seluruh Pemda Provinsi di Indonesia, berarti mencakup 33 daerah provinsi. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dengan menggunakan Daftar K-1 dan APBD-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Kantor Gubernur (Pemda Provinsi) tiap-tiap provinsi.

### **I.3. Konsep dan Definisi**

#### **Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemda Provinsi**

Adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi pada tiap tahun anggaran.

#### **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.



### **Retribusi Daerah**

Yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi daerah, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

### **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

### **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Yaitu meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### **Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

### **Bagi Hasil Bukan Pajak**

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

### **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri bantuan dana kontijensi/penyeimbang/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvability.

### **Belanja Daerah**

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

### **Belanja Tidak Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Belanja Pegawai Tidak Langsung**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

**Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

**Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

**Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan**

Adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

**Bantuan Partai Politik**

Adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

### **Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah propinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

### **Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah propinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

### **Belanja Tidak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### **Belanja Pegawai Langsung**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

### **Belanja Barang dan Jasa**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

### **Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan asset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat

ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### **Pembiayaan Daerah**

Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah ;
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
  - b. Transfer dari Dana Cadangan
  - c. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
  - d. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ;
  - a. Transfer ke Dana Cadangan
  - b. Penyertaan Modal
  - c. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo
  - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### **Pencairan Dana Cadangan**

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan asset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

### **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

### **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

### **Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.



**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal / investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

**Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan**

Adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

## II. URAIAN RINGKAS

### II.1. Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pembangunan yang dilakukan di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah. Pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air.

Berhubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi guna merencanakan pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Untuk membiayai pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelolaan APBD Provinsi terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Sejak tahun 2002, kebijaksanaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Namun pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan otomatis kembali terjadi perubahan format laporan keuangan pemerintah daerah, terutama pada sisi pengeluaran. Pada sistem pelaporan pengeluaran daerah dibagi dalam dua kelompok pengeluaran yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Disebut *tidak langsung* karena belanja tersebut dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, dan sebaliknya disebut *langsung* karena belanja tersebut dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

## II.2. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai macam penerimaan, namun demikian secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
  - a. Bagi Hasil Pajak
  - b. Bagi Hasil Bukan Pajak
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pada tabel A. menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2004-2006 mengalami peningkatan, dengan total pendapatan dari sebesar 46.220 miliar rupiah pada tahun 2004, menjadi 56.908 miliar rupiah dan 69.377 miliar pada tahun 2005 dan 2006. Peningkatan ini selain disebabkan naiknya penerimaan yang berasal dari dana perimbangan, juga karena adanya berbagai upaya Pemerintah Daerah yang telah dilakukan sejak tahun 2004, serta perkembangan ekonomi khususnya perkembangan basis pendapatan daerah yang ada. Pada tahun 2005 pendapatan pemerintah daerah secara umum meningkat 23,12 persen begitu juga pada tahun 2006 terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar 21,91 persen. Namun pada tahun 2007 secara umum pemerintah daerah tidak terlalu

optimis, dan hanya menganggarkan peningkatan pendapatan sebesar 6,41 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh kecilnya peningkatan PAD pada tahun 2006, hanya sebesar 9,58 persen, Sedangkan pada tahun sebelumnya meningkat sebesar 23,58 persen. Dalam rangka meningkatkan penghasilan pendapatan daerah, ditempuh berbagai kebijakan di bidang perpajakan, hal ini dilakukan karena daerah tidak dapat terus mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatannya. Oleh karena itu pemerintah daerah hanya menganggarkan pendapatan pada tahun 2007 sebesar 73.823 miliar rupiah.

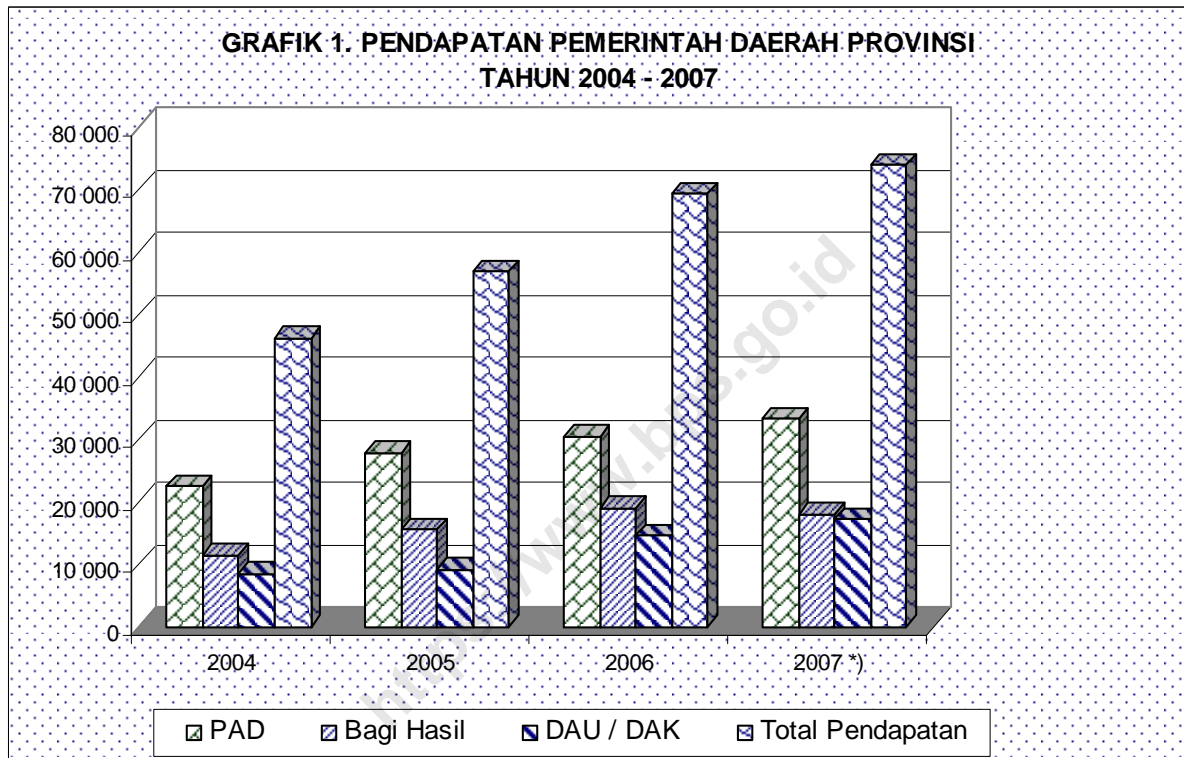
**Tabel A**  
**Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan**  
**2004 - 2007**  
**(miliar rupiah)**

No.	Jenis Penerimaan	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	22 565	27 886	30 556	33 261
	a. Pajak Daerah	19 694	24 209	25 719	28 404
	b. Retribusi Daerah	1 156	1 344	1 602	1 847
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	517	776	853	909
	d. Lain-lain PAD yang Sah	1 198	1 557	2 383	2 101
2.	Dana Perimbangan	20 162	24 778	33 654	35 386
	a. Bagi Hasil Pajak	7 370	8 870	10 281	11 344
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4 152	6 658	8 782	6 769
	c. Dana Alokasi Umum	8 624	9 223	14 571	16 499
	d. Dana Alokasi Khusus	16	26	20	775
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3 493	4 244	5 166	5 176
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>46 220</b>	<b>56 908</b>	<b>69 377</b>	<b>73 823</b>

\*) Data APBD

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri, oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal. Selama periode tahun 2004-2006, perkembangan PAD terus mengalami kenaikan, dari 22.565 miliar rupiah pada tahun 2004 menjadi masing-masing sebesar 27.886 miliar rupiah dan 30.556 miliar rupiah pada

tahun 2005 dan 2006. Peningkatan penerimaan dari PAD yang cukup besar ini didukung oleh kenaikan penerimaan pajak daerah. Peran kedua terbesar setelah pajak daerah yaitu dari lain-lain PAD yang sah, kemudian retribusi daerah, dan yang paling kecil perannya yaitu penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pada tahun 2007 dianggarkan dapat memperoleh PAD sebesar 33.261 miliar rupiah.



Selain dari PAD sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak ataupun bagi hasil sumber daya alam. Pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dari tahun ke tahun terus meningkat, begitu juga bagi hasil sumber daya alamnya. Pendapatan keduanya sebesar 11.521 miliar rupiah pada tahun 2004, 15.528 miliar rupiah pada tahun 2005 dan 19.063 miliar rupiah pada tahun 2006. sedangkan anggaran pendapatan BH Pajak/SDA pada tahun 2007 hanya sebesar 18.113 miliar rupiah.

Dari tabel B dapat dilihat bahwa mulai tahun 2004 persentase pendapatan yang berdasarkan dari PAD berimbang dengan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Tetapi jika dilihat dari DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat menandakan ketergantungan pemerintah daerah hanya sekitar 20 persen. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, masing-masing sebesar 48,82 persen dan 49,00 persen pada tahun 2004 dan 2005, lalu pada tahun 2006 turun menjadi 44,04 persen dan pada tahun 2007 pemerintah daerah tidak terlalu optimis dan hanya menganggarkan kontribusi PAD sebesar 45,05 persen. Dari sumber penerimaan yang dikategorikan kedalam PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang paling dominan, dari tahun 2004 sampai tahun 2006 besarnya kontribusi adalah 42,61 persen, 42,54 persen dan 37,07 persen.

**Tabel B**  
**Persentase Kontribusi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan**  
**2004 – 2007**

No.	Jenis Penerimaan	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	48.82	49.00	44.04	45.05
	a. Pajak Daerah	42.61	42.54	37.07	38.48
	b. Retribusi Daerah	2.50	2.36	2.31	2.50
	c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.12	1.36	1.23	1.23
	d. Lain-lain PAD yang Sah	2.59	2.74	3.43	2.85
2.	Dana Perimbangan	43.62	43.54	48.51	47.93
	a. Bagi Hasil Pajak	15.94	15.59	14.82	15.37
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8.98	11.70	12.66	9.17
	c. Dana Alokasi Umum	18.66	16.21	21.00	22.35
	d. Dana Alokasi Khusus	0.04	0.05	0.03	1.05
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.56	7.46	7.45	7.01
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		100.00	100.00	100.00	100.00

\*) *Data APBD*

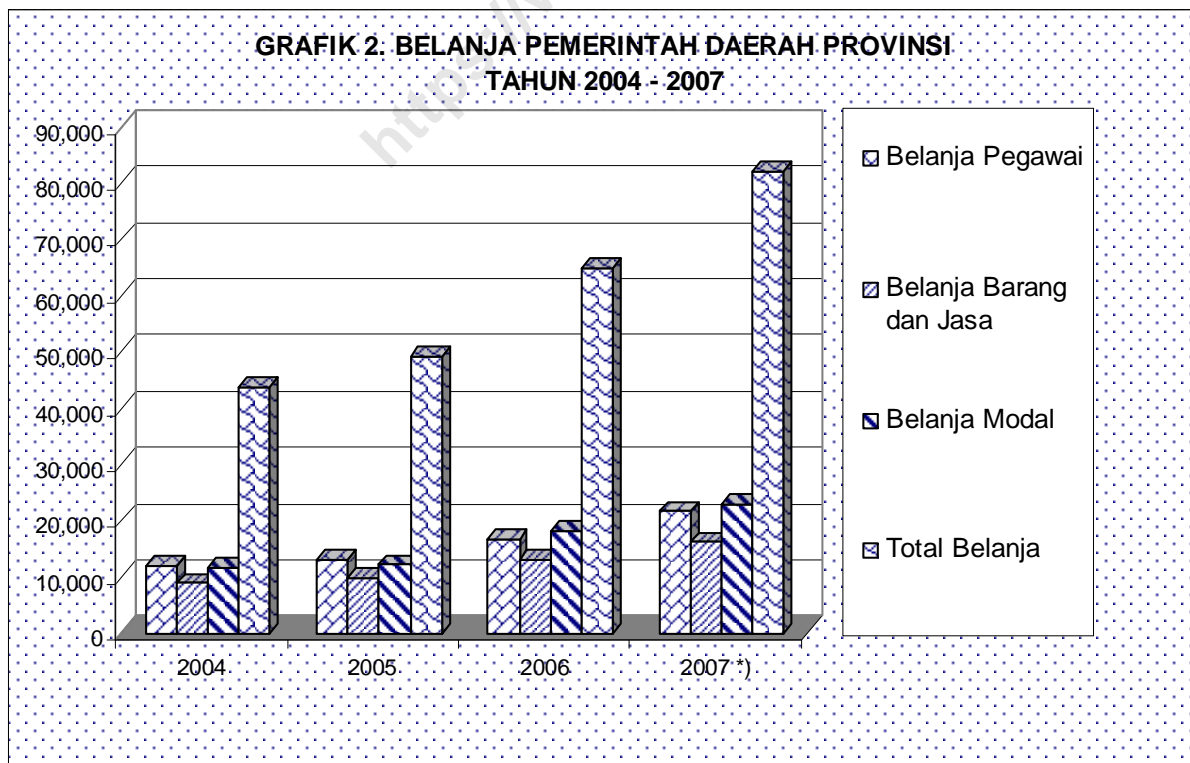
Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan memiliki kontribusi sebesar 43,62 persen, 43,54 persen dan 48,51 persen pada tahun 2004, 2005 dan 2006, sedangkan pada tahun 2007 dianggarkan mencapai 47,93 persen. Penerimaan dari dana perimbangan ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang didapatkan dari daerah itu sendiri berupa bagi hasil pajak/bukan pajak, dan yang kedua adalah berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang

berasal dari transfer pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum terutama ditujukan untuk memenuhi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja pegawai.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan dari pendapatan daerah yang paling kecil kontribusinya terhadap total pendapatan, dimana pada tahun 2003 hanya sebesar 9,96 persen bahkan pada tahun 2004 dan 2005 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 7,56 persen dan 7,46 persen.

### II.3. Belanja Daerah

Dana yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi secara garis besar dipergunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dimana setelah diterapkannya sistem anggaran berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada data series yang ditampilkan pada tahun 2004 sampai dengan 2006 merupakan hasil konversi dari format belanja daerah berdasarkan kinerja kedalam format baru.



Secara umum realisasi belanja daerah pada tahun 2005 dan 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2004, yaitu dari 43.637 miliar rupiah pada tahun 2004 menjadi 49.200 miliar rupiah dan 64.786 miliar rupiah pada tahun 2005 dan 2006. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatannya. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada hampir seluruh jenis belanja, baik pada bagian belanja tidak langsung maupun bagian belanja langsung. Dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, secara umum setiap daerah memperoleh surplus. Tetapi pada anggaran tahun 2007 belanja daerah sebesar 81.937 miliar rupiah, dan terjadi devisa anggaran disebabkan oleh daerah yang menganggarkan untuk menggunakan pendapatan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit anggaran. (Tabel C).

**Tabel C**  
**Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi**  
**Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja**  
**2004 - 2007**  
**(miliar rupiah)**

No.	Jenis Pengeluaran	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>20 317</b>	<b>24 219</b>	<b>30 302</b>	<b>36 796</b>
1.	Belanja Pegawai	8 991	10 039	13 519	15 632
2.	Belanja Bunga	40	35	41	51
3.	Belanja Subsidi	0	0	4	112
4.	Belanja Hibah	752	940	1 194	292
5.	Belanja Bantuan Sosial	1 838	2 216	2 624	3 695
6.	Belanja Bagi Hasil	5 339	7 974	9 457	9 440
7.	Belanja Bantuan Keuangan	2 915	2 667	2 986	6 995
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	442	348	479	578
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>23 320</b>	<b>24 981</b>	<b>34 484</b>	<b>45 141</b>
1.	Belanja Pegawai	2 859	2 956	3 268	5 965
2.	Belanja Barang dan Jasa	8 904	9 822	13 053	16 217
3.	Belanja Modal	11 558	12 203	18 163	22 958
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>43 637</b>	<b>49 200</b>	<b>64 786</b>	<b>81 937</b>

\*) Data APBD

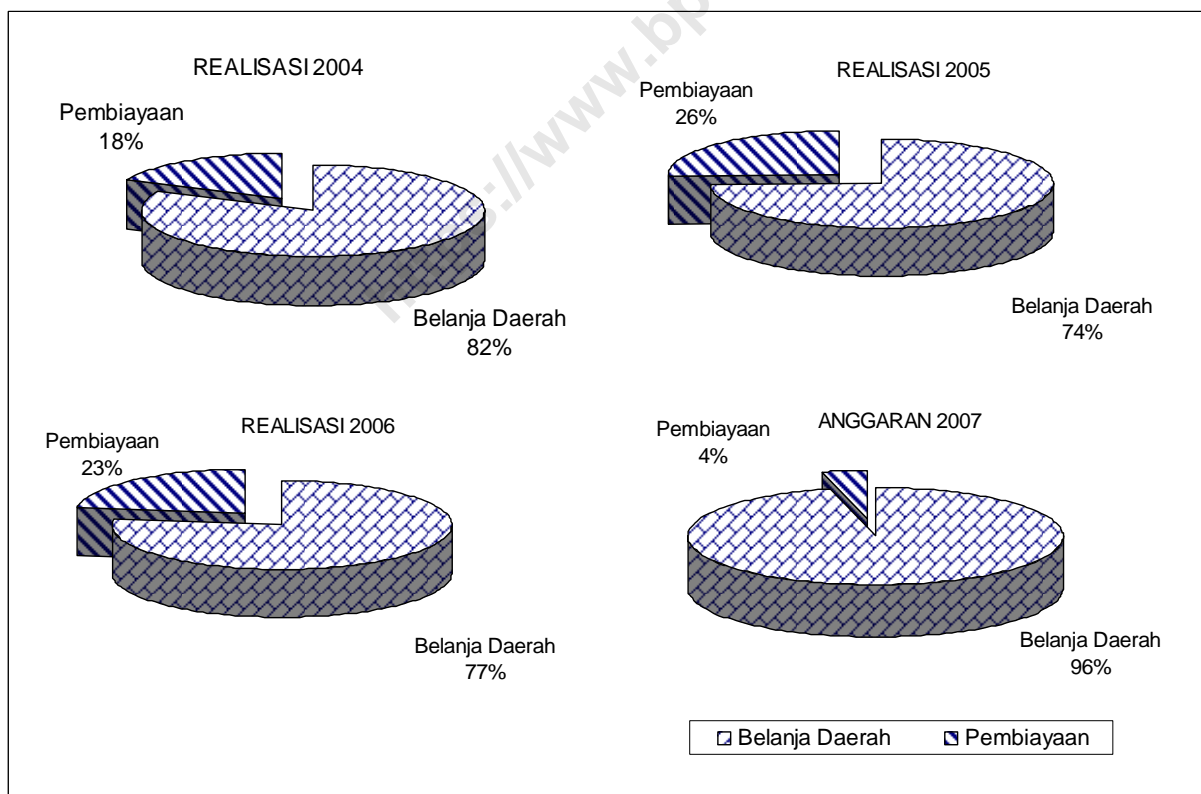
Komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja modal yaitu 11.558 miliar rupiah pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sebesar 12.205 miliar rupiah atau naik 5,59 persen, lalu pada tahun 2006 naik sebesar 48,84 persen menjadi 18.163 miliar rupiah. Komponen



belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja pegawai tak langsung yaitu sebesar 8.991 miliar rupiah, 10.039 miliar rupiah dan 13.519 miliar rupiah pada tahun 2004, 2005 dan 2006, juga mengalami kenaikan sebesar 11,66 persen pada tahun 2005 dan 34,66 persen pada tahun 2006. Pada tahun 2007 belanja pegawai tak langsung dianggarkan sebesar 15.632 miliar rupiah atau 15,64 persen lebih tinggi dari realisasi 2006. Belanja barang juga memiliki pengeluaran yang cukup besar yaitu sebesar 8.904 miliar rupiah pada tahun 2004, 9.822 miliar rupiah dan 13.053 miliar rupiah pada tahun 2005 dan 2006 atau naik sebesar 10,31 persen dan 32,90 persen.

Realisasi belanja daerah dilihat dari sisi penyerapan mencapai 81,84 persen pada tahun 2004, lalu turun pada tahun 2005 hanya terserap 74,31 persen, dan 77,07 persen pada tahun 2006, tetapi target penyerapan pada anggaran 2007 mencapai 96,07 persen.

**GRAFIK 3. PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
TAHUN 2004 - 2007**



**Tabel D**  
**Persentase Kontribusi Realisasi Belanja**  
**Pemerintah Daerah Provinsi Seluruh Indonesia**  
**Menurut Jenis Belanja**  
**2004 – 2007**

No.	Jenis Pengeluaran	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>46.56</b>	<b>49.23</b>	<b>46.77</b>	<b>44.91</b>
1.	Belanja Pegawai	20.60	20.41	20.87	19.08
2.	Belanja Bunga	0.09	0.07	0.06	0.06
3.	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.01	0.14
4.	Belanja Hibah	1.72	1.91	1.84	0.36
5.	Belanja Bantuan Sosial	4.21	4.50	4.05	4.51
6.	Belanja Bagi Hasil	12.23	16.21	14.60	11.52
7.	Belanja Bantuan Keuangan	6.68	5.42	4.61	8.54
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	1.01	0.71	0.74	0.71
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>53.44</b>	<b>50.77</b>	<b>53.23</b>	<b>55.09</b>
1.	Belanja Pegawai	6.55	6.01	5.04	7.28
2.	Belanja Barang dan Jasa	20.40	19.96	20.15	19.79
3.	Belanja Modal	26.49	24.80	28.04	28.02
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

\*) Data APBD

Dalam struktur belanja daerah terlihat bahwa belanja langsung memiliki kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja tak langsung. Pada tahun 2004 kontribusi belanja langsung sebesar 53,44 persen dari total belanja daerah, kemudian pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 50,77 persen dan 53,23 persen. Sedangkan belanja tak langsung pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 46,56 persen dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 49,23 persen pada tahun 2005 dan 44,77 persen pada tahun 2006.

Dalam struktur belanja tak langsung pada tahun 2004 dan 2005, peranan belanja pegawai terlihat dominan yaitu masing-masing sebesar 20,60 persen dan 20,41 persen, begitu juga pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 20,87 persen. Sedangkan pada belanja langsung didominasi oleh belanja modal dan belanja barang/jasa, yaitu sebesar 26,49 persen dan 20,40 persen pada tahun 2004; 24,80 persen dan 19,90 persen pada tahun 2005, lalu pada tahun 2006 sebesar 28,04 persen dan 20,15 persen. (Tabel D)

#### **II.4. Kesimpulan**

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah dari tahun 2004 sampai tahun 2006 terus mengalami kenaikan, seiring dengan kondisi ekonomi yang dalam beberapa aspek mulai menunjukkan perbaikan serta kinerja ekonomi yang bergerak ke arah yang lebih positif dan lebih baik daripada tahun anggaran sebelumnya.

Secara umum Pertumbuhan penerimaan daerah pada tahun 2004 – 2006 mencapai angka 20 persen, jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi maupun angka inflasi.

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dari tahun 2004 – 2006 yang hanya mampu menyerap sekitar 80 persen dari penerimaan.

Kontribusi terbesar pada Belanja Daerah terdapat pada belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang/Jasa, yang pada tahun 2006 mencapai 28,04 persen; 25,91 persen dan 20,15 persen juga dapat di katakan bahwa 74,1 persen belanja daerah digunakan untuk ketiga hal tersebut diatas.

**TABEL**  
**TABLE** 1.a

**REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA**  
**2004**  
**(000 rupiah)**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2 257 969 320	648 774 102	2 906 743 422	1 963 266 444	943 476 978	2 906 743 422
2.	Sumatera Utara	1 664 099 166	218 599 416	1 882 698 582	1 556 953 808	325 744 774	1 882 698 582
3.	Sumatera Barat	683 907 637	140 544 128	824 451 765	656 342 774	168 108 991	824 451 765
4.	R i a u	2 119 999 304	497 409 054	2 617 408 358	1 972 354 333	645 054 025	2 617 408 358
5.	J a m b i	649 936 054	126 783 977	776 720 031	660 930 017	115 790 014	776 720 031
6.	Sumatera Selatan	1 088 213 436	190 918 717	1 279 132 153	1 141 094 674	138 037 479	1 279 132 153
7.	Bengkulu	352 557 237	41 736 234	394 293 471	339 862 295	54 431 176	394 293 471
8.	Lampung	822 725 455	174 907 941	997 633 396	751 108 751	246 524 645	997 633 396
9.	Bangka Belitung	327 658 234	85 822 132	413 480 366	293 930 373	119 549 993	413 480 366
10.	Kepulauan Riau	192 146 545	0	192 146 545	190 351 945	1 794 600	192 146 545
11.	DKI Jakarta	11 546 326 315	1 674 007 199	13 220 333 514	11 493 273 272	1 727 060 242	13 220 333 514
12.	Jawa Barat	4 044 464 689	668 422 609	4 712 887 298	3 670 567 300	1 042 319 998	4 712 887 298
13.	Jawa Tengah	2 883 599 220	383 353 110	3 266 952 330	2 538 436 760	728 515 570	3 266 952 330
14.	D I Yogyakarta	645 617 697	183 668 609	829 286 306	639 238 851	190 047 455	829 286 306
15.	Jawa Timur	3 953 714 569	502 424 620	4 456 139 189	3 516 027 159	940 112 030	4 456 139 189
16.	Banten	1 345 976 011	114 531 794	1 460 507 805	1 091 721 309	368 786 496	1 460 507 805
17.	B a l i	806 558 657	89 356 491	895 915 148	664 634 245	231 280 903	895 915 148
18.	Nusa Tenggara Barat	472 286 945	41 359 881	513 646 826	428 526 876	85 119 950	513 646 826
19.	Nusa Tenggara Timur	466 335 627	195 349 648	661 685 275	389 541 889	272 143 386	661 685 275
20.	Kalimantan Barat	620 104 530	68 124 432	688 228 962	596 643 368	91 585 594	688 228 962
21.	Kalimantan Tengah	491 797 499	59 130 610	550 928 109	475 131 857	75 796 252	550 928 109
22.	Kalimantan Selatan	666 064 468	12 740 105	678 804 573	585 331 361	93 473 212	678 804 573
23.	Kalimantan Timur	2 532 796 293	577 495 032	3 110 291 325	2 629 006 469	481 284 856	3 110 291 325
24.	Sulawesi Utara	413 514 925	22 976 748	436 491 673	407 432 468	29 059 205	436 491 673
25.	Sulawesi Tengah	413 605 244	51 966 320	465 571 564	417 136 719	48 434 845	465 571 564
26.	Sulawesi Selatan	1 025 052 366	129 920 740	1 154 973 106	938 635 570	216 337 536	1 154 973 106
27.	Sulawesi Tenggara	361 354 740	19 948 851	381 303 591	361 332 021	19 971 570	381 303 591
28.	Gorontalo	256 131 278	19 735 272	275 866 550	241 154 866	34 711 684	275 866 550
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
30.	M a l u k u	403 366 825	29 394 487	432 761 312	393 176 335	39 584 977	432 761 312
31.	Maluku Utara	272 584 990	6 874 146	279 459 136	269 778 542	9 680 594	279 459 136
32.	P a p u a	2 439 385 960	121 381 080	2 560 767 040	2 363 886 290	196 880 750	2 560 767 040
33.	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>46 219 851 236</b>	<b>7 097 657 485</b>	<b>53 317 508 721</b>	<b>43 636 808 941</b>	<b>9 680 699 780</b>	<b>53 317 508 721</b>

**TABEL**  
**TABLE** 1.b

**REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA**  
**2005**  
**(000 rupiah)**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3 807 617 892	1 273 509 253	5 081 127 145	2 169 779 959	2 911 347 186	5 081 127 145
2.	Sumatera Utara	1 906 371 997	245 738 114	2 152 110 111	1 830 574 334	321 535 777	2 152 110 111
3.	Sumatera Barat	780 024 635	151 883 991	931 908 626	745 548 636	186 359 990	931 908 626
4.	R i a u	2 671 762 163	614 741 025	3 286 503 188	2 437 724 828	848 778 360	3 286 503 188
5.	J a m b i	748 820 793	172 929 694	921 750 487	642 833 021	278 917 466	921 750 487
6.	Sumatera Selatan	1 388 170 596	23 850 581	1 412 021 177	1 097 417 954	314 603 223	1 412 021 177
7.	Bengkulu	391 315 589	54 431 176	445 746 765	373 510 532	72 236 233	445 746 765
8.	Lampung	1 045 903 177	239 524 645	1 285 427 822	865 266 187	420 161 635	1 285 427 822
9.	Bangka Belitung	436 728 366	131 521 138	568 249 504	340 243 532	228 005 972	568 249 504
10.	Kepulauan Riau	421 824 411	1 794 600	423 619 011	419 662 517	3 956 494	423 619 011
11.	DKI Jakarta	13 476 933 941	1 930 251 607	15 407 185 548	12 447 564 533	2 959 621 015	15 407 185 548
12.	Jawa Barat	4 824 888 266	875 138 566	5 700 026 832	4 309 282 268	1 390 744 564	5 700 026 832
13.	Jawa Tengah	3 526 839 402	542 577 294	4 069 416 696	2 936 310 814	1 133 105 882	4 069 416 696
14.	D I Yogyakarta	699 579 306	173 507 197	873 086 503	676 198 526	196 887 977	873 086 503
15.	Jawa Timur	4 609 953 808	841 134 877	5 451 088 685	4 045 400 885	1 405 687 800	5 451 088 685
16.	Banten	1 598 106 614	305 906 599	1 904 013 213	1 488 344 098	415 669 115	1 904 013 213
17.	B a l i	1 013 082 502	171 280 904	1 184 363 406	841 177 979	343 185 427	1 184 363 406
18.	Nusa Tenggara Barat	529 021 796	73 569 569	602 591 365	517 908 765	84 682 600	602 591 365
19.	Nusa Tenggara Timur	498 225 418	249 591 252	747 816 670	443 975 446	303 841 224	747 816 670
20.	Kalimantan Barat	681 655 553	68 123 430	749 778 983	686 752 656	63 026 327	749 778 983
21.	Kalimantan Tengah	568 999 528	87 619 190	656 618 718	538 145 012	118 473 706	656 618 718
22.	Kalimantan Selatan	923 963 478	89 959 275	1 013 922 753	796 733 444	217 189 309	1 013 922 753
23.	Kalimantan Timur	3 689 829 642	422 784 855	4 112 614 497	2 093 467 731	2 019 146 766	4 112 614 497
24.	Sulawesi Utara	488 042 057	28 326 171	516 368 228	465 353 220	51 015 008	516 368 228
25.	Sulawesi Tengah	458 559 253	48 434 844	506 994 097	457 689 986	49 304 111	506 994 097
26.	Sulawesi Selatan	1 165 441 994	220 273 327	1 385 715 321	1 165 951 630	219 763 691	1 385 715 321
27.	Sulawesi Tenggara	392 387 677	18 963 943	411 351 620	373 385 660	37 965 960	411 351 620
28.	Gorontalo	270 235 402	32 942 915	303 178 317	250 377 234	52 801 083	303 178 317
29.	Sulawesi Barat	101 719 907	0	101 719 907	91 719 907	10 000 000	101 719 907
30.	M a l u k u	515 712 801	35 303 443	551 016 244	513 107 493	37 908 751	551 016 244
31.	Maluku Utara	309 175 369	5 940 314	315 115 683	282 748 105	32 367 578	315 115 683
32.	P a p u a	2 673 992 910	170 033 230	2 844 026 140	2 661 026 510	182 999 630	2 844 026 140
33.	Papua Barat	292 955 938	1 020 752	293 976 690	194 623 335	99 353 355	293 976 690
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>56 907 842 181</b>	<b>9 302 607 771</b>	<b>66 210 449 952</b>	<b>49 199 806 737</b>	<b>17 010 643 215</b>	<b>66 210 449 952</b>

**TABEL**  
**TABLE** 1.c

**REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA**  
**2006**  
**(000 rupiah)**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	4 067 191 813	1 877 160 961	5 944 352 774	2 442 721 686	3 501 631 088	5 944 352 774
2.	Sumatera Utara	2 299 465 405	217 937 578	2 517 402 983	2 184 668 830	332 734 153	2 517 402 983
3.	Sumatera Barat	1 058 664 158	147 708 192	1 206 372 350	960 089 657	246 282 693	1 206 372 350
4.	R i a u	3 579 679 042	831 884 360	4 411 563 402	3 171 096 747	1 240 466 655	4 411 563 402
5.	J a m b i	1 010 116 940	280 698 822	1 290 815 762	963 238 880	327 576 882	1 290 815 762
6.	Sumatera Selatan	1 866 212 730	259 900 775	2 126 113 505	1 741 587 199	384 526 306	2 126 113 505
7.	Bengkulu	556 308 031	75 951 032	632 259 063	504 874 262	127 384 801	632 259 063
8.	Lampung	1 294 948 833	410 233 213	1 705 182 046	1 341 056 665	364 125 381	1 705 182 046
9.	Bangka Belitung	534 173 639	227 005 972	761 179 611	463 381 818	297 797 793	761 179 611
10.	Kepulauan Riau	1 131 634 051	261 061 149	1 392 695 200	912 308 731	480 386 469	1 392 695 200
11.	DKI Jakarta	14 337 530 976	3 107 087 921	17 444 618 897	15 161 577 796	2 283 041 101	17 444 618 897
12.	Jawa Barat	5 047 199 211	1 000 895 099	6 048 094 310	4 907 738 249	1 140 356 061	6 048 094 310
13.	Jawa Tengah	3 818 467 960	814 829 550	4 633 297 510	3 747 644 090	885 653 420	4 633 297 510
14.	D I Yogyakarta	881 144 850	189 400 980	1 070 545 830	850 630 248	219 915 582	1 070 545 830
15.	Jawa Timur	5 103 267 666	1 245 199 284	6 348 466 950	5 126 544 600	1 221 922 350	6 348 466 950
16.	Banten	1 587 901 993	352 917 848	1 940 819 841	1 812 123 879	128 695 962	1 940 819 841
17.	B a l i	1 150 934 290	256 422 410	1 407 356 700	1 215 474 100	191 882 600	1 407 356 700
18.	Nusa Tenggara Barat	740 870 869	75 990 834	816 861 703	731 491 661	85 370 042	816 861 703
19.	Nusa Tenggara Timur	704 101 271	294 705 889	998 807 160	637 291 268	361 515 892	998 807 160
20.	Kalimantan Barat	1 047 098 094	62 788 210	1 109 886 304	952 697 811	157 188 493	1 109 886 304
21.	Kalimantan Tengah	889 459 523	93 808 130	983 267 653	840 513 197	142 754 456	983 267 653
22.	Kalimantan Selatan	1 179 994 168	195 626 451	1 375 620 619	1 130 858 645	244 761 974	1 375 620 619
23.	Kalimantan Timur	4 847 421 022	1 999 681 766	6 847 102 788	3 768 786 321	3 078 316 467	6 847 102 788
24.	Sulawesi Utara	653 592 446	66 024 839	719 617 285	649 758 172	69 859 113	719 617 285
25.	Sulawesi Tengah	682 525 017	47 204 072	729 729 089	652 931 968	76 797 121	729 729 089
26.	Sulawesi Selatan	1 480 115 047	190 188 442	1 670 303 489	1 392 341 273	277 962 216	1 670 303 489
27.	Sulawesi Tenggara	598 368 956	36 325 654	634 694 610	561 198 292	73 496 318	634 694 610
28.	Gorontalo	460 791 544	6 485 870	467 277 414	396 602 358	70 675 056	467 277 414
29.	Sulawesi Barat	325 557 827	22 243 637	347 801 464	273 783 117	74 018 347	347 801 464
30.	M a l u k u	558 231 780	32 908 750	591 140 530	541 215 700	49 924 830	591 140 530
31.	Maluku Utara	449 495 072	0	449 495 072	427 335 313	22 159 759	449 495 072
32.	P a p u a	4 895 058 660	0	4 895 058 660	3 918 020 420	977 038 240	4 895 058 660
33.	Papua Barat	539 190 302	0	539 190 302	404 238 908	134 951 394	539 190 302
	<b>JUMLAH/TOTAL</b>	<b>69 376 713 186</b>	<b>14 680 277 690</b>	<b>84 056 990 876</b>	<b>64 785 821 861</b>	<b>19 271 169 015</b>	<b>84 056 990 876</b>

**TABEL**  
**TABLE** 1.d

**REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT AND EXPENDITURE THROUGHOUT INDONESIA**  
**2007 \*)**  
**(000 rupiah)**

No.	Provinsi Province	Penerimaan / Receipt			Pengeluaran / Expenditure		
		Pendapatan Revenue	Pembiayaan Financing	Jumlah Total	Belanja Expenditure	Pembiayaan Financing	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3 165 343 682	1 914 946 604	5 080 290 286	4 047 191 176	1 033 099 110	5 080 290 286
2.	Sumatera Utara	2 462 184 416	275 674 150	2 737 858 566	2 717 858 566	20 000 000	2 737 858 566
3.	Sumatera Barat	1 144 286 889	212 782 693	1 357 069 582	1 351 807 242	5 262 340	1 357 069 582
4.	R i a u	3 646 197 118	799 489 371	4 445 686 489	4 187 692 062	257 994 427	4 445 686 489
5.	J a m b i	1 043 015 240	312 576 882	1 355 592 122	1 291 600 630	63 991 492	1 355 592 122
6.	Sumatera Selatan	2 194 239 954	150 000 000	2 344 239 954	2 302 939 954	41 300 000	2 344 239 954
7.	Bengkulu	646 020 895	55 050 000	701 070 895	701 070 895	0	701 070 895
8.	Lampung	1 262 181 464	305 418 535	1 567 599 999	1 555 599 999	12 000 000	1 567 599 999
9.	Bangka Belitung	554 071 132	289 085 320	843 156 452	765 543 760	77 612 692	843 156 452
10.	Kepulauan Riau	1 115 393 670	444 606 330	1 560 000 000	1 536 767 400	23 232 600	1 560 000 000
11.	DKI Jakarta	18 309 444 250	2 680 095 544	20 989 539 794	20 950 750 000	38 789 794	20 989 539 794
12.	Jawa Barat	5 149 869 616	419 179 953	5 569 049 569	5 272 083 680	296 965 889	5 569 049 569
13.	Jawa Tengah	4 381 123 710	156 674 060	4 537 797 770	4 090 553 650	447 244 120	4 537 797 770
14.	D I Yogyakarta	911 558 526	175 451 253	1 087 009 779	1 067 390 920	19 618 859	1 087 009 779
15.	Jawa Timur	5 008 562 100	250 795 060	5 259 357 160	5 046 444 760	212 912 400	5 259 357 160
16.	Banten	1 835 821 000	91 400 000	1 927 221 000	1 927 221 000	0	1 927 221 000
17.	B a l i	1 219 347 800	66 132 750	1 285 480 550	1 257 200 440	28 280 110	1 285 480 550
18.	Nusa Tenggara Barat	853 745 557	50 000 000	903 745 557	885 745 557	18 000 000	903 745 557
19.	Nusa Tenggara Timur	849 697 915	353 304 772	1 203 002 687	1 036 093 936	166 908 751	1 203 002 687
20.	Kalimantan Barat	1 081 137 406	0	1 081 137 406	1 081 137 406	0	1 081 137 406
21.	Kalimantan Tengah	997 945 000	105 000 000	1 102 945 000	1 082 945 000	20 000 000	1 102 945 000
22.	Kalimantan Selatan	1 272 850 931	40 450 000	1 313 300 931	1 262 708 593	50 592 338	1 313 300 931
23.	Kalimantan Timur	3 098 194 500	1 160 000 000	4 258 194 500	4 113 194 500	145 000 000	4 258 194 500
24.	Sulawesi Utara	733 083 818	93 891 739	826 975 557	778 838 417	48 137 140	826 975 557
25.	Sulawesi Tengah	698 959 193	5 500 000	704 459 193	695 859 193	8 600 000	704 459 193
26.	Sulawesi Selatan	1 607 595 757	120 943 319	1 728 539 076	1 717 839 076	10 700 000	1 728 539 076
27.	Sulawesi Tenggara	696 831 116	1 266 500	698 097 616	685 097 616	13 000 000	698 097 616
28.	Gorontalo	476 291 710	104 134 892	580 426 602	540 926 602	39 500 000	580 426 602
29.	Sulawesi Barat	341 086 880	29 533 700	370 620 580	356 660 580	13 960 000	370 620 580
30.	M a l u k u	615 973 140	31 739 340	647 712 480	636 206 080	11 506 400	647 712 480
31.	Maluku Utara	501 719 467	23 052 767	524 772 234	516 706 814	8 065 420	524 772 234
32.	P a p u a	5 371 967 360	673 618 030	6 045 585 390	5 856 893 440	188 691 950	6 045 585 390
33.	Papua Barat	577 371 000	73 626 342	650 997 342	620 137 697	30 859 645	650 997 342
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>73 823 112 212</b>	<b>11 465 419 906</b>	<b>85 288 532 118</b>	<b>81 936 706 641</b>	<b>3 351 825 477</b>	<b>85 288 532 118</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*THROUGHOUT INDONESIA BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>46 219 851 236</b>	<b>56 907 842 181</b>	<b>69 376 713 186</b>	<b>73 823 112 212</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	22 564 852 398	27 885 722 629	30 556 135 053	33 260 809 288
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	19 694 489 319	24 208 786 980	25 719 347 146	28 404 433 674
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 155 670 807	1 344 475 078	1 601 546 853	1 847 001 740
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	517 112 400	775 550 046	852 500 283	908 509 236
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	1 197 579 872	1 556 910 525	2 382 740 771	2 100 864 638
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	20 162 126 913	24 777 712 234	33 654 398 517	35 386 380 931
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	7 369 521 193	8 869 816 934	10 280 860 925	11 343 717 401
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 151 944 835	6 658 425 251	8 782 163 818	6 769 156 530
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	8 624 205 792	9 223 416 989	14 571 373 774	16 498 507 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	16 455 093	26 053 060	20 000 000	775 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 492 871 925	4 244 407 318	5 166 179 616	5 175 921 993
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>7 097 657 485</b>	<b>9 302 607 771</b>	<b>14 680 277 690</b>	<b>11 465 419 906</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>53 317 508 721</b>	<b>66 210 449 952</b>	<b>84 056 990 876</b>	<b>85 288 532 118</b>

\*) Data APBD



**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF NANGGROE ACEH DARUSSALAM BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 257 969 320</b>	<b>3 807 617 892</b>	<b>4 067 191 813</b>	<b>3 165 343 682</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	198 432 402	262 119 988	476 909 834	563 106 082
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	138 257 821	177 472 432	309 612 956	307 015 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	3 854 846	969 245	6 942 878	8 817 364
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	1 832 377	11 735	18 493 041	40 010 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	54 487 358	83 666 576	141 860 959	207 263 718
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 205 286 145	2 169 014 546	2 312 771 517	1 952 237 600
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	49 823 969	84 435 412	120 084 184	79 995 293
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 079 338 176	1 807 379 074	1 731 806 333	1 384 308 307
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	76 124 000	271 147 000	460 881 000	487 934 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	6 053 060	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	854 250 773	1 376 483 358	1 277 510 462	650 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>648 774 102</b>	<b>1 273 509 253</b>	<b>1 877 160 961</b>	<b>1 914 946 604</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 906 743 422</b>	<b>5 081 127 145</b>	<b>5 944 352 774</b>	<b>5 080 290 286</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.2

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF NORTH SUMATERA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 664 099 166</b>	<b>1 906 371 997</b>	<b>2 299 465 405</b>	<b>2 462 184 416</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 136 071 834	1 361 818 034	1 502 608 215	1 502 955 444
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 081 371 913	1 301 137 842	1 366 445 063	1 419 250 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	23 756 055	18 852 328	11 714 728	10 706 010
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	8 523 503	90 291 200	52 676 439
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	30 943 866	33 304 361	34 157 224	20 322 995
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	512 975 463	518 391 297	782 842 712	921 810 784
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	186 674 985	202 359 849	240 832 727	262 763 784
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	6 559 478	2 286 448	2 291 985	1 690 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	319 741 000	313 745 000	539 718 000	657 357 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	15 051 869	26 162 666	14 014 478	37 418 188
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>218 599 416</b>	<b>245 738 114</b>	<b>217 937 578</b>	<b>275 674 150</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 882 698 582</b>	<b>2 152 110 111</b>	<b>2 517 402 983</b>	<b>2 737 858 566</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.3

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF WEST SUMATERA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>683 907 637</b>	<b>780 024 635</b>	<b>1 058 664 158</b>	<b>1 144 286 889</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	375 074 888	448 279 018	494 929 543	491 315 593
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	307 314 463	375 966 916	409 139 881	411 331 750
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8 105 734	9 405 448	10 785 842	33 168 443
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	26 063 960	25 812 650	25 574 011	29 397 400
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	33 590 731	37 094 004	49 429 809	17 418 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	296 263 749	310 066 307	554 231 885	621 337 720
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	56 160 415	57 640 621	71 452 737	69 270 199
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 854 334	4 938 686	5 750 148	5 735 521
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	234 249 000	247 487 000	477 029 000	546 332 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	12 569 000	21 679 310	9 502 730	31 633 576
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>140 544 128</b>	<b>151 883 991</b>	<b>147 708 192</b>	<b>212 782 693</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>824 451 765</b>	<b>931 908 626</b>	<b>1 206 372 350</b>	<b>1 357 069 582</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.4

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI R I A U MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF R I A U BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 119 999 304</b>	<b>2 671 762 163</b>	<b>3 579 679 042</b>	<b>3 646 197 118</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	706 474 506	769 561 702	964 668 290	990 224 116
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	610 150 463	655 884 682	764 546 115	822 150 500
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	15 313 192	30 285 178	29 658 738	32 096 714
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	36 620 058	25 144 359	45 790 566	48 714 293
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	44 390 793	58 247 483	124 672 871	87 262 609
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 248 715 798	1 783 743 461	2 489 065 459	2 635 973 002
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	229 700 245	246 733 407	328 546 801	331 831 573
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	957 387 553	1 444 853 054	2 068 360 658	2 026 482 429
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	61 628 000	92 157 000	92 158 000	277 659 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	164 809 000	118 457 000	125 945 293	20 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>497 409 054</b>	<b>614 741 025</b>	<b>831 884 360</b>	<b>799 489 371</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 617 408 358</b>	<b>3 286 503 188</b>	<b>4 411 563 402</b>	<b>4 445 686 489</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.5

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF JAMBI BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>649 936 054</b>	<b>748 820 793</b>	<b>1 010 116 940</b>	<b>1 043 015 240</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	285 932 960	344 880 739	385 042 832	382 082 240
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	246 152 088	281 727 567	311 123 600	336 930 550
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	16 706 721	18 455 153	20 337 125	22 705 252
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	3 772 748	2 262 249	2 724 207	2 707 269
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	19 301 403	42 435 770	50 857 900	19 739 169
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	355 478 094	393 688 552	625 074 108	631 433 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	86 256 217	96 137 317	128 281 061	121 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	45 874 877	53 933 235	122 432 047	95 415 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	223 347 000	243 618 000	374 361 000	415 018 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	8 525 000	10 251 502	0	29 500 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>126 783 977</b>	<b>172 929 694</b>	<b>280 698 822</b>	<b>312 576 882</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>776 720 031</b>	<b>921 750 487</b>	<b>1 290 815 762</b>	<b>1 355 592 122</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.6

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF SOUTH SUMATERA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 088 213 436</b>	<b>1 388 170 596</b>	<b>1 866 212 730</b>	<b>2 194 239 954</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	493 132 547	590 860 840	741 957 493	885 949 608
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	413 657 153	511 334 752	650 294 156	763 800 585
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	4 707 561	4 011 299	5 575 681	10 111 153
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	13 695 674	26 002 990	21 209 406	24 559 640
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	61 072 159	49 511 799	64 878 250	87 478 230
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	575 979 889	786 818 756	1 124 255 237	1 308 290 346
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	165 974 360	199 251 316	253 337 292	258 093 346
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	185 131 529	344 860 440	449 536 945	540 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	224 874 000	242 707 000	421 381 000	510 197 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	19 101 000	10 491 000	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>190 918 717</b>	<b>23 850 581</b>	<b>259 900 775</b>	<b>150 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 279 132 153</b>	<b>1 412 021 177</b>	<b>2 126 113 505</b>	<b>2 344 239 954</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.7

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF BENGKULU BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>352 557 237</b>	<b>391 315 589</b>	<b>556 308 031</b>	<b>646 020 895</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	104 920 822	122 165 595	165 100 789	191 104 230
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	80 647 318	93 346 379	115 792 924	132 094 436
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	13 010 042	14 801 112	31 378 589	35 981 573
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	2 926 170	4 085 561	4 620 305	804 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	8 337 292	9 932 543	13 308 971	22 224 221
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	239 606 415	254 143 754	391 160 410	454 916 665
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	16 416 992	22 783 785	7 488 738	40 576 020
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	571 423	706 969	5 621 672	8 482 645
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	222 618 000	230 653 000	378 050 000	405 858 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	8 030 000	15 006 240	46 832	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>41 736 234</b>	<b>54 431 176</b>	<b>75 951 032</b>	<b>55 050 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>394 293 471</b>	<b>445 746 765</b>	<b>632 259 063</b>	<b>701 070 895</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.8

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF LAMPUNG BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>822 725 455</b>	<b>1 045 903 177</b>	<b>1 294 948 833</b>	<b>1 262 181 464</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	410 682 088	549 673 305	631 981 956	589 551 294
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	350 772 072	468 358 783	507 987 600	490 630 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	32 608 275	48 488 536	65 250 545	68 822 859
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	4 107 141	7 300 728	7 488 182	9 619 943
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	23 194 600	25 525 258	51 255 629	20 478 492
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	410 775 132	496 229 872	662 966 877	672 630 170
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	44 496 312	65 505 385	78 287 508	56 805 891
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	79 456 820	144 962 653	123 781 369	106 168 279
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	286 822 000	285 761 834	460 898 000	509 656 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 268 235	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>174 907 941</b>	<b>239 524 645</b>	<b>410 233 213</b>	<b>305 418 535</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>997 633 396</b>	<b>1 285 427 822</b>	<b>1 705 182 046</b>	<b>1 567 599 999</b>

\*) Data APBD



**TABEL**  
**TABLE** 2.9

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF BANGKA BELITUNG BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>327 658 234</b>	<b>436 728 366</b>	<b>534 173 639</b>	<b>554 071 132</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	114 541 173	188 304 374	198 173 312	206 286 132
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	106 887 357	172 164 295	173 574 904	189 999 842
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	660 951	638 049	942 895	854 290
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	93 407	137 019	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	6 899 458	15 365 011	23 655 513	15 432 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	209 951 010	246 999 992	336 000 327	347 785 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	17 567 679	22 744 322	24 467 423	16 350 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	22 156 331	36 897 670	35 842 904	12 078 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	170 227 000	187 358 000	275 690 000	319 357 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	3 166 051	1 424 000	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>85 822 132</b>	<b>131 521 138</b>	<b>227 005 972</b>	<b>289 085 320</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>413 480 366</b>	<b>568 249 504</b>	<b>761 179 611</b>	<b>843 156 452</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.10

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF RIAU ISLANDS BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>192 146 545</b>	<b>421 824 411</b>	<b>1 131 634 051</b>	<b>1 115 393 670</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	69 615 976	162 271 790	281 830 846	281 526 519
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	69 615 976	161 513 138	260 511 592	267 908 164
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	293 452	378 481	485 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	0	465 200	20 940 773	13 133 355
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	90 397 569	235 952 621	849 803 205	803 867 151
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	62 905 919	95 207 302	124 792 905	128 847 988
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	24 778 650	104 782 319	546 679 310	341 689 163
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	2 713 000	25 963 000	178 330 990	333 330 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	10 000 000	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	32 133 000	23 600 000	0	30 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>0</b>	<b>1 794 600</b>	<b>261 061 149</b>	<b>444 606 330</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>192 146 545</b>	<b>423 619 011</b>	<b>1 392 695 200</b>	<b>1 560 000 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.11

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF DKI JAKARTA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>11 546 326 315</b>	<b>13 476 933 941</b>	<b>14 337 530 976</b>	<b>18 309 444 250</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	6 430 334 808	7 597 867 917	7 817 457 600	10 084 255 250
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	5 497 782 460	6 513 811 209	6 482 649 163	8 334 270 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	423 059 461	419 674 270	449 340 321	625 574 830
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	102 057 272	103 219 808	131 903 430	139 351 196
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	407 435 615	561 162 630	753 564 686	985 059 224
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	5 096 297 651	5 770 008 024	6 520 073 376	7 572 132 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	4 099 019 155	4 858 538 161	5 533 851 713	7 202 189 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	89 722 496	138 445 963	213 197 563	250 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	907 556 000	773 023 900	773 024 100	119 943 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	19 693 856	109 058 000	0	653 057 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>1 674 007 199</b>	<b>1 930 251 607</b>	<b>3 107 087 921</b>	<b>2 680 095 544</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>13 220 333 514</b>	<b>15 407 185 548</b>	<b>17 444 618 897</b>	<b>20 989 539 794</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.12

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF WEST JAVA BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>4 044 464 689</b>	<b>4 824 888 266</b>	<b>5 047 199 211</b>	<b>5 149 869 616</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 846 800 735	3 604 767 566	3 748 404 051	3 621 802 763
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 688 355 976	3 385 936 560	3 449 101 477	3 425 187 030
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	24 812 621	26 385 982	31 369 856	28 510 638
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	69 060 296	88 205 800	111 998 489	115 486 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	64 571 842	104 239 224	155 934 229	52 619 095
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 197 663 954	1 220 120 700	1 298 795 160	1 522 066 853
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	487 502 308	542 261 596	601 796 182	487 107 640
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	136 383 646	107 199 104	131 245 978	101 523 213
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	573 778 000	570 660 000	565 753 000	933 436 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	0	6 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>668 422 609</b>	<b>875 138 566</b>	<b>1 000 895 099</b>	<b>419 179 953</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 712 887 298</b>	<b>5 700 026 832</b>	<b>6 048 094 310</b>	<b>5 569 049 569</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.13

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF CENTRAL JAVA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 883 599 220</b>	<b>3 526 839 402</b>	<b>3 818 467 960</b>	<b>4 381 123 710</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	1 865 390 530	2 490 643 742	2 630 621 270	3 001 641 710
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	1 602 699 350	1 996 141 372	2 160 427 370	2 511 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	146 643 880	194 158 778	265 390 090	287 385 600
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 808 250	207 047 862	93 747 350	100 853 670
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	103 239 050	93 295 730	111 056 460	102 402 440
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	789 076 690	807 132 660	1 185 860 720	1 379 482 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	232 479 050	254 490 500	291 714 804	324 935 481
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 533 640	2 686 160	3 725 916	3 814 519
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	553 064 000	549 956 000	890 420 000	1 050 732 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	229 132 000	229 063 000	1 985 970	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>383 353 110</b>	<b>542 577 294</b>	<b>814 829 550</b>	<b>156 674 060</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 266 952 330</b>	<b>4 069 416 696</b>	<b>4 633 297 510</b>	<b>4 537 797 770</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.14

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF DI YOGYAKARTA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>645 617 697</b>	<b>699 579 306</b>	<b>881 144 850</b>	<b>911 558 526</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	347 404 225	401 912 338	436 482 095	420 568 426
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	307 572 364	360 119 664	374 563 344	378 916 439
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	10 418 456	11 940 416	12 454 920	14 722 357
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	13 813 584	11 859 586	11 217 079	12 371 830
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	15 599 821	17 992 672	38 246 752	14 557 800
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	283 268 472	277 237 968	442 882 532	488 667 515
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	35 214 430	38 538 974	40 377 303	51 270 179
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	5 042	6 994	21 229	18 336
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	248 049 000	238 692 000	402 484 000	437 379 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	14 945 000	20 429 000	1 780 223	2 322 585
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>183 668 609</b>	<b>173 507 197</b>	<b>189 400 980</b>	<b>175 451 253</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>829 286 306</b>	<b>873 086 503</b>	<b>1 070 545 830</b>	<b>1 087 009 779</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.15

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF EAST JAVA BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>3 953 714 569</b>	<b>4 609 953 808</b>	<b>5 103 267 666</b>	<b>5 008 562 100</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	2 860 561 595	3 464 580 023	3 703 283 577	3 436 417 100
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	2 540 067 580	3 089 131 887	3 256 903 358	3 081 650 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	175 966 812	212 083 421	261 665 588	206 119 870
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	50 418 648	51 814 077	61 252 024	66 897 980
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	94 108 555	111 550 638	123 462 607	81 749 250
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	862 509 974	909 866 655	1 376 748 105	1 558 200 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	395 124 932	448 439 925	529 628 905	452 856 769
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	4 057 042	6 791 730	26 346 200	15 343 231
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	463 328 000	454 635 000	820 773 000	1 090 000 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	230 643 000	235 507 130	23 235 984	13 945 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>502 424 620</b>	<b>841 134 877</b>	<b>1 245 199 284</b>	<b>250 795 060</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 456 139 189</b>	<b>5 451 088 685</b>	<b>6 348 466 950</b>	<b>5 259 357 160</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.16

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF BANTEN BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 345 976 011</b>	<b>1 598 106 614</b>	<b>1 587 901 993</b>	<b>1 835 821 000</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	818 246 374	1 070 237 769	1 118 023 281	1 269 062 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	797 040 184	1 037 938 696	1 071 092 401	1 229 850 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	2 163 827	2 498 721	2 709 167	2 610 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	9 355 693	13 201 473	16 102 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	19 042 363	20 444 659	31 020 240	20 500 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	518 487 669	522 487 103	465 377 434	564 584 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	330 489 906	324 296 992	219 851 656	234 116 230
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	134 763	172 111	231 778	173 770
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	187 863 000	198 018 000	245 294 000	330 294 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 241 968	5 381 742	4 501 278	2 175 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>114 531 794</b>	<b>305 906 599</b>	<b>352 917 848</b>	<b>91 400 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 460 507 805</b>	<b>1 904 013 213</b>	<b>1 940 819 841</b>	<b>1 927 221 000</b>

\*) *Data APBD*



**TABEL**  
**TABLE** 2.17

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF BALI BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>806 558 657</b>	<b>1 013 082 502</b>	<b>1 150 934 290</b>	<b>1 219 347 800</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	559 681 558	742 886 074	729 338 160	712 916 820
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	508 913 728	663 349 780	638 538 480	629 011 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	6 522 653	9 693 181	11 684 380	12 075 800
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	21 352 432	35 305 176	40 839 900	43 050 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	22 892 745	34 537 937	38 275 400	28 780 020
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	236 938 134	261 364 428	421 596 130	505 074 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	43 387 955	61 440 428	67 808 574	68 286 577
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	744 459	0	481 556	254 423
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	192 805 720	199 924 000	353 306 000	436 533 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	9 938 965	8 832 000	0	1 356 980
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>89 356 491</b>	<b>171 280 904</b>	<b>256 422 410</b>	<b>66 132 750</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>895 915 148</b>	<b>1 184 363 406</b>	<b>1 407 356 700</b>	<b>1 285 480 550</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.18

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF WEST NUSA TENGGARA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>472 286 945</b>	<b>529 021 796</b>	<b>740 870 869</b>	<b>853 745 557</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	170 222 966	196 166 682	265 025 384	329 240 557
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	126 439 285	146 983 510	190 480 828	251 860 020
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	17 441 615	20 435 172	25 658 802	32 515 073
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 429 055	10 810 826	23 281 278	19 573 747
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 913 011	17 937 174	25 604 476	25 291 717
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	294 335 979	325 956 114	475 845 485	524 505 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	30 824 551	42 137 696	49 121 165	47 700 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	31 974 428	33 931 418	22 579 320	29 247 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	231 537 000	249 887 000	404 145 000	447 558 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	7 728 000	6 899 000	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>41 359 881</b>	<b>73 569 569</b>	<b>75 990 834</b>	<b>50 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>513 646 826</b>	<b>602 591 365</b>	<b>816 861 703</b>	<b>903 745 557</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.19

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF EAST NUSA TENGGARA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>466 335 627</b>	<b>498 225 418</b>	<b>704 101 271</b>	<b>849 697 915</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	123 690 370	140 629 071	175 951 830	191 852 909
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	76 778 923	85 548 574	101 615 740	112 744 822
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	16 680 810	19 962 622	27 074 633	32 196 174
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	8 894 561	13 433 344	10 500 472	13 731 500
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	21 336 076	21 684 531	36 760 985	33 180 413
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	333 935 257	349 951 347	528 149 441	602 845 006
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	28 406 963	44 440 153	48 562 402	49 085 572
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	54 294	37 419	151 039	170 434
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	305 474 000	305 473 775	479 436 000	553 589 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	8 710 000	7 645 000	0	55 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>195 349 648</b>	<b>249 591 252</b>	<b>294 705 889</b>	<b>353 304 772</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>661 685 275</b>	<b>747 816 670</b>	<b>998 807 160</b>	<b>1 203 002 687</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.20

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF WEST KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>620 104 530</b>	<b>681 655 553</b>	<b>1 047 098 094</b>	<b>1 081 137 406</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	264 677 306	295 462 266	377 846 301	393 336 746
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	225 774 598	253 716 781	315 458 450	337 482 070
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	13 329 030	20 281 089	31 908 130	31 670 911
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	12 447 293	10 465 919	10 471 627	11 615 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	13 126 385	10 998 477	20 008 094	12 568 765
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	346 854 224	378 683 287	669 251 793	684 800 660
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	50 283 393	63 014 510	74 546 267	68 885 134
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 159 831	3 096 777	8 678 526	5 025 526
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	294 411 000	312 572 000	586 027 000	610 890 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	8 573 000	7 510 000	0	3 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>68 124 432</b>	<b>68 123 430</b>	<b>62 788 210</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>688 228 962</b>	<b>749 778 983</b>	<b>1 109 886 304</b>	<b>1 081 137 406</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.21

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF CENTRAL KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>491 797 499</b>	<b>568 999 528</b>	<b>889 459 523</b>	<b>997 945 000</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	112 680 630	154 092 830	215 751 229	257 180 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	96 376 662	128 105 738	177 793 231	210 520 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	7 544 962	11 253 605	17 528 750	27 328 720
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	2 944 860	4 559 545	7 096 250	9 015 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	5 814 146	10 173 942	13 332 998	10 316 280
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	349 214 595	372 614 589	673 708 294	675 765 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	52 656 870	63 165 174	88 646 309	76 714 457
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	21 960 725	21 873 803	33 061 985	27 760 543
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	274 597 000	287 575 612	552 000 000	571 290 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	29 902 274	42 292 109	0	65 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>59 130 610</b>	<b>87 619 190</b>	<b>93 808 130</b>	<b>105 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>550 928 109</b>	<b>656 618 718</b>	<b>983 267 653</b>	<b>1 102 945 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.22

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF SOUTH KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>666 064 468</b>	<b>923 963 478</b>	<b>1 179 994 168</b>	<b>1 272 850 931</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	364 205 587	530 110 534	585 031 999	647 951 931
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	331 032 946	454 434 811	478 480 924	565 961 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	3 742 071	34 085 148	43 047 603	54 673 931
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	9 447 877	9 408 311	9 313 381	13 157 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	19 982 693	32 182 264	54 190 091	14 160 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	301 858 881	388 055 704	594 962 169	558 469 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	65 198 855	89 080 855	100 918 609	85 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	26 981 034	60 607 879	115 377 560	45 475 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	209 678 992	238 366 970	378 666 000	427 994 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	5 797 240	0	66 430 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>12 740 105</b>	<b>89 959 275</b>	<b>195 626 451</b>	<b>40 450 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>678 804 573</b>	<b>1 013 922 753</b>	<b>1 375 620 619</b>	<b>1 313 300 931</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.23

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF EAST KALIMANTAN BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 532 796 293</b>	<b>3 689 829 642</b>	<b>4 847 421 022</b>	<b>3 098 194 500</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	705 631 207	897 515 818	1 196 995 516	994 805 500
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	520 787 406	694 849 783	787 649 943	732 500 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	99 531 156	105 479 111	108 608 509	120 650 500
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	54 682 598	31 693 813	29 999 189	32 325 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	30 630 047	65 493 111	270 737 875	109 330 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1 827 165 086	2 792 313 824	3 465 865 506	2 103 389 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	242 336 032	382 271 906	513 380 594	279 326 893
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 318 054 054	2 144 449 918	2 879 936 912	1 566 954 107
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	266 775 000	265 592 000	72 548 000	257 108 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	0	184 560 000	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>577 495 032</b>	<b>422 784 855</b>	<b>1 999 681 766</b>	<b>1 160 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 110 291 325</b>	<b>4 112 614 497</b>	<b>6 847 102 788</b>	<b>4 258 194 500</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.24

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF NORTH SULAWESI BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>413 514 925</b>	<b>488 042 057</b>	<b>653 592 446</b>	<b>733 083 818</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	147 139 838	198 270 258	211 236 498	217 855 471
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	120 461 623	158 600 865	166 801 206	178 326 052
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8 066 437	8 056 513	8 255 493	4 919 698
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	6 320 256	24 686 526	24 905 230	26 700 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	12 291 522	6 926 354	11 274 569	7 909 721
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	244 934 087	275 479 569	442 355 948	488 228 347
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	23 440 739	26 666 660	36 737 091	39 824 664
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	867 348	939 909	1 294 857	1 403 683
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	220 626 000	247 873 000	404 324 000	447 000 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	21 441 000	14 292 230	0	27 000 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>22 976 748</b>	<b>28 326 171</b>	<b>66 024 839</b>	<b>93 891 739</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>436 491 673</b>	<b>516 368 228</b>	<b>719 617 285</b>	<b>826 975 557</b>

\*) Data APBD



**TABEL**  
**TABLE** 2.25

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF CENTRAL SULAWESI BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>413 605 244</b>	<b>458 559 253</b>	<b>682 525 017</b>	<b>698 959 193</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	122 907 876	141 349 356	160 508 900	160 523 937
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	102 888 783	120 026 304	135 032 260	133 787 500
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8 327 098	9 572 370	15 732 897	15 176 530
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	246 337	915 498	1 340 739	3 810 647
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	11 445 658	10 835 184	8 403 004	7 749 260
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	282 135 368	309 461 557	521 910 355	537 049 716
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	22 220 624	36 732 242	41 372 066	32 052 431
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	1 769 744	973 315	2 870 289	2 868 285
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	258 145 000	271 756 000	477 668 000	502 129 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	8 562 000	7 748 340	105 762	1 385 540
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>51 966 320</b>	<b>48 434 844</b>	<b>47 204 072</b>	<b>5 500 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>465 571 564</b>	<b>506 994 097</b>	<b>729 729 089</b>	<b>704 459 193</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.26

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF SOUTH SULAWESI BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>1 025 052 366</b>	<b>1 165 441 994</b>	<b>1 480 115 047</b>	<b>1 607 595 757</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	563 613 146	675 857 266	775 509 546	805 306 444
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	470 373 815	565 425 353	660 156 134	686 439 049
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	45 106 409	48 464 701	55 478 976	54 947 765
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	33 229 651	40 871 344	37 178 147	41 964 682
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	14 903 271	21 095 868	22 696 289	21 954 948
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	446 743 220	476 672 728	677 865 697	758 011 899
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	122 970 335	128 032 224	150 047 282	141 146 829
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	10 158 885	15 915 504	18 280 415	17 357 070
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	313 614 000	332 725 000	509 538 000	599 508 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	14 696 000	12 912 000	26 739 804	44 277 414
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>129 920 740</b>	<b>220 273 327</b>	<b>190 188 442</b>	<b>120 943 319</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 154 973 106</b>	<b>1 385 715 321</b>	<b>1 670 303 489</b>	<b>1 728 539 076</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.27

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF SOUTHEAST SULAWESI BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>361 354 740</b>	<b>392 387 677</b>	<b>598 368 956</b>	<b>696 831 116</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	91 543 232	101 069 223	120 632 754	162 390 116
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	64 903 900	74 062 029	85 577 499	118 108 140
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	8 023 779	10 438 365	12 251 122	17 164 244
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	5 845 180	5 407 636	5 350 427	9 790 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	12 770 373	11 161 193	17 453 706	17 327 732
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	256 467 508	283 934 454	477 736 202	516 641 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	18 541 253	25 247 090	43 079 986	46 138 126
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	2 667 505	4 525 364	8 302 216	8 661 874
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	235 258 750	254 162 000	426 354 000	461 841 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	13 344 000	7 384 000	0	17 800 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>19 948 851</b>	<b>18 963 943</b>	<b>36 325 654</b>	<b>1 266 500</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>381 303 591</b>	<b>411 351 620</b>	<b>634 694 610</b>	<b>698 097 616</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.28

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF GORONTALO BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>256 131 278</b>	<b>270 235 402</b>	<b>460 791 544</b>	<b>476 291 710</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	37 821 922	46 112 986	54 115 211	50 500 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	30 415 448	37 409 805	44 707 905	44 425 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	1 361 184	2 779 488	85 662	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	255 625	290 678	0	1 175 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	5 789 665	5 633 015	9 321 644	4 900 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	218 309 356	224 086 659	406 259 368	303 194 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	6 939 863	12 991 572	14 683 205	11 686 718
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	654 493	82 095	186 163	113 282
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	210 715 000	211 012 992	391 390 000	291 394 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	35 757	416 965	122 597 710
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>19 735 272</b>	<b>32 942 915</b>	<b>6 485 870</b>	<b>104 134 892</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>275 866 550</b>	<b>303 178 317</b>	<b>467 277 414</b>	<b>580 426 602</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.29

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF WEST SULAWESI BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>0</b>	<b>101 719 907</b>	<b>325 557 827</b>	<b>341 086 880</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	0	20 549 836	35 390 237	39 033 880
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	0	20 311 401	30 697 910	34 070 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	238 435	659 882	785 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	0	0	4 032 445	4 178 880
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	0	79 170 071	283 882 465	302 053 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	0	13 650 000	18 479 769	12 500 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	0	195 696	300 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	0	65 520 071	255 207 000	279 253 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	0	10 000 000	10 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	2 000 000	6 285 125	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 243 637</b>	<b>29 533 700</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>101 719 907</b>	<b>347 801 464</b>	<b>370 620 580</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.30

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT*  
*OF MALUKU BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>403 366 825</b>	<b>515 712 801</b>	<b>558 231 780</b>	<b>615 973 140</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	57 308 316	77 357 815	79 080 170	100 304 390
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	40 643 448	51 141 212	49 194 830	67 714 700
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	9 046 859	16 277 689	17 170 940	25 144 620
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and</i> <i>Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	600 000	500 000	500 000	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	7 018 009	9 438 914	12 214 400	7 445 070
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	307 584 789	321 525 302	477 886 900	515 393 750
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	21 917 376	39 149 293	48 625 067	36 269 069
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	3 545 530	3 321 009	4 124 833	3 076 681
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	272 417 750	279 055 000	425 137 000	476 048 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	9 704 133	0	0	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	38 473 720	116 829 684	1 264 710	275 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>29 394 487</b>	<b>35 303 443</b>	<b>32 908 750</b>	<b>31 739 340</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>432 761 312</b>	<b>551 016 244</b>	<b>591 140 530</b>	<b>647 712 480</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.31

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF NORTH MALUKU BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>272 584 990</b>	<b>309 175 369</b>	<b>449 495 072</b>	<b>501 719 467</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	18 009 121	26 933 238	49 516 624	45 102 720
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	14 556 486	24 466 676	24 157 692	21 500 025
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	515 181	5 020 490	12 751 461
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	2 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	3 452 635	1 951 381	20 338 442	8 351 234
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	247 592 695	282 242 131	399 978 448	456 616 747
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	15 775 910	35 128 082	43 343 061	36 750 751
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	15 876 785	17 884 154	18 030 703	34 141 996
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	212 240 000	229 229 895	338 604 684	370 724 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	3 700 000	0	0	15 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	6 983 174	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>6 874 146</b>	<b>5 940 314</b>	<b>0</b>	<b>23 052 767</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>279 459 136</b>	<b>315 115 683</b>	<b>449 495 072</b>	<b>524 772 234</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 2.32

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENERIMAAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT  
OF PAPUA BY RECEIPT ITEMS*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>2 439 385 960</b>	<b>2 673 992 910</b>	<b>4 895 058 660</b>	<b>5 371 967 360</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	162 101 860	198 626 710	214 585 830	212 159 360
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	125 797 730	136 301 540	163 238 210	158 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	9 158 310	14 001 020	15 485 140	16 329 360
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	11 147 090	16 417 810	12 212 880	20 550 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	15 998 730	31 906 340	23 649 600	17 280 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	575 324 060	684 333 580	1 192 188 830	1 864 060 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	128 813 600	133 245 000	191 712 117	119 340 787
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	73 529 920	132 221 640	190 239 713	118 424 213
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	369 929 580	418 866 940	810 237 000	876 295 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	3 050 960	0	0	750 000 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	1 701 960 040	1 791 032 620	3 488 284 000	3 295 748 000
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>121 381 080</b>	<b>170 033 230</b>	<b>0</b>	<b>673 618 030</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 560 767 040</b>	<b>2 844 026 140</b>	<b>4 895 058 660</b>	<b>6 045 585 390</b>

\*) Data APBD



**TABEL**  
**TABLE** 2.33

**REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENERIMAAN**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RECEIPT**  
**OF WEST PAPUA BY RECEIPT ITEMS**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT REVENUE</b>	<b>0</b>	<b>292 955 938</b>	<b>539 190 302</b>	<b>577 371 000</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	0	12 787 926	12 143 880	22 500 000
1.1.	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	0	12 066 644	6 000 000	20 000 000
1.2.	Retribusi Daerah <i>Repayments</i>	0	0	0	0
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	0	0	0	0
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Gov. Revenue</i>	0	721 282	6 143 880	2 500 000
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	0	269 964 622	527 046 422	554 871 000
2.1.	Bagi Hasil Pajak <i>Tax Share</i>	0	114 059 185	155 005 422	75 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non Tax Share/Natural Resources</i>	0	17 662 437	11 500 000	15 000 000
2.3.	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	0	128 243 000	350 541 000	464 871 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	0	10 000 000	10 000 000	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	0	10 203 390	0	0
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>0</b>	<b>1 020 752</b>	<b>0</b>	<b>73 626 342</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>293 976 690</b>	<b>539 190 302</b>	<b>650 997 342</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 3.A  
**TABLE**

**REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA**  
**ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT REVENUE THROUGHOUT INDONESIA**  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2 257 969 320	3 807 617 892	4 067 191 813	3 165 343 682
2.	Sumatera Utara	1 664 099 166	1 906 371 997	2 299 465 405	2 462 184 416
3.	Sumatera Barat	683 907 637	780 024 635	1 058 664 158	1 144 286 889
4.	R i a u	2 119 999 304	2 671 762 163	3 579 679 042	3 646 197 118
5.	J a m b i	649 936 054	748 820 793	1 010 116 940	1 043 015 240
6.	Sumatera Selatan	1 088 213 436	1 388 170 596	1 866 212 730	2 194 239 954
7.	Bengkulu	352 557 237	391 315 589	556 308 031	646 020 895
8.	Lampung	822 725 455	1 045 903 177	1 294 948 833	1 262 181 464
9.	Bangka Belitung	327 658 234	436 728 366	534 173 639	554 071 132
10.	Kepulauan Riau	192 146 545	421 824 411	1 131 634 051	1 115 393 670
11.	DKI Jakarta	11 546 326 315	13 476 933 941	14 337 530 976	18 309 444 250
12.	Jawa Barat	4 044 464 689	4 824 888 266	5 047 199 211	5 149 869 616
13.	Jawa Tengah	2 883 599 220	3 526 839 402	3 818 467 960	4 381 123 710
14.	D I Yogyakarta	645 617 697	699 579 306	881 144 850	911 558 526
15.	Jawa Timur	3 953 714 569	4 609 953 808	5 103 267 666	5 008 562 100
16.	Banten	1 345 976 011	1 598 106 614	1 587 901 993	1 835 821 000
17.	B a l i	806 558 657	1 013 082 502	1 150 934 290	1 219 347 800
18.	Nusa Tenggara Barat	472 286 945	529 021 796	740 870 869	853 745 557
19.	Nusa Tenggara Timur	466 335 627	498 225 418	704 101 271	849 697 915
20.	Kalimantan Barat	620 104 530	681 655 553	1 047 098 094	1 081 137 406
21.	Kalimantan Tengah	491 797 499	568 999 528	889 459 523	997 945 000
22.	Kalimantan Selatan	666 064 468	923 963 478	1 179 994 168	1 272 850 931
23.	Kalimantan Timur	2 532 796 293	3 689 829 642	4 847 421 022	3 098 194 500
24.	Sulawesi Utara	413 514 925	488 042 057	653 592 446	733 083 818
25.	Sulawesi Tengah	413 605 244	458 559 253	682 525 017	698 959 193
26.	Sulawesi Selatan	1 025 052 366	1 165 441 994	1 480 115 047	1 607 595 757
27.	Sulawesi Tenggara	361 354 740	392 387 677	598 368 956	696 831 116
28.	Gorontalo	256 131 278	270 235 402	460 791 544	476 291 710
29.	Sulawesi Barat	0	101 719 907	325 557 827	341 086 880
30.	M a l u k u	403 366 825	515 712 801	558 231 780	615 973 140
31.	Maluku Utara	272 584 990	309 175 369	449 495 072	501 719 467
32.	P a p u a	2 439 385 960	2 673 992 910	4 895 058 660	5 371 967 360
33.	Papua Barat	0	292 955 938	539 190 302	577 371 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>46 219 851 236</b>	<b>56 907 842 181</b>	<b>69 376 713 186</b>	<b>73 823 112 212</b>

\*) Data APBD

TABEL 3.1  
TABLE

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SELURUH INDONESIA  
ACTUAL PROVINCIAL GOVERNMENT ORIGINAL REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	198 432 402	262 119 988	476 909 834	563 106 082
2.	Sumatera Utara	1 136 071 834	1 361 818 034	1 502 608 215	1 502 955 444
3.	Sumatera Barat	375 074 888	448 279 018	494 929 543	491 315 593
4.	R i a u	706 474 506	769 561 702	964 668 290	990 224 116
5.	J a m b i	285 932 960	344 880 739	385 042 832	382 082 240
6.	Sumatera Selatan	493 132 547	590 860 840	741 957 493	885 949 608
7.	Bengkulu	104 920 822	122 165 595	165 100 789	191 104 230
8.	Lampung	410 682 088	549 673 305	631 981 956	589 551 294
9.	Bangka Belitung	114 541 173	188 304 374	198 173 312	206 286 132
10.	Kepulauan Riau	69 615 976	162 271 790	281 830 846	281 526 519
11.	DKI Jakarta	6 430 334 808	7 597 867 917	7 817 457 600	10 084 255 250
12.	Jawa Barat	2 846 800 735	3 604 767 566	3 748 404 051	3 621 802 763
13.	Jawa Tengah	1 865 390 530	2 490 643 742	2 630 621 270	3 001 641 710
14.	D I Yogyakarta	347 404 225	401 912 338	436 482 095	420 568 426
15.	Jawa Timur	2 860 561 595	3 464 580 023	3 703 283 577	3 436 417 100
16.	Banten	818 246 374	1 070 237 769	1 118 023 281	1 269 062 000
17.	B a l i	559 681 558	742 886 074	729 338 160	712 916 820
18.	Nusa Tenggara Barat	170 222 966	196 166 682	265 025 384	329 240 557
19.	Nusa Tenggara Timur	123 690 370	140 629 071	175 951 830	191 852 909
20.	Kalimantan Barat	264 677 306	295 462 266	377 846 301	393 336 746
21.	Kalimantan Tengah	112 680 630	154 092 830	215 751 229	257 180 000
22.	Kalimantan Selatan	364 205 587	530 110 534	585 031 999	647 951 931
23.	Kalimantan Timur	705 631 207	897 515 818	1 196 995 516	994 805 500
24.	Sulawesi Utara	147 139 838	198 270 258	211 236 498	217 855 471
25.	Sulawesi Tengah	122 907 876	141 349 356	160 508 900	160 523 937
26.	Sulawesi Selatan	563 613 146	675 857 266	775 509 546	805 306 444
27.	Sulawesi Tenggara	91 543 232	101 069 223	120 632 754	162 390 116
28.	Gorontalo	37 821 922	46 112 986	54 115 211	50 500 000
29.	Sulawesi Barat	0	20 549 836	35 390 237	39 033 880
30.	M a l u k u	57 308 316	77 357 815	79 080 170	100 304 390
31.	Maluku Utara	18 009 121	26 933 238	49 516 624	45 102 720
32.	P a p u a	162 101 860	198 626 710	214 585 830	212 159 360
33.	Papua Barat	0	12 787 926	12 143 880	22 500 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>22 564 852 398</b>	<b>27 885 722 629</b>	<b>30 556 135 053</b>	<b>33 260 809 288</b>

\*) Data APBD

TABEL  
TABLE 3.1.1

REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL PROVINCIAL GOVERNMENT LOCAL INCOME TAXES  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	138 257 821	177 472 432	309 612 956	307 015 000
2.	Sumatera Utara	1 081 371 913	1 301 137 842	1 366 445 063	1 419 250 000
3.	Sumatera Barat	307 314 463	375 966 916	409 139 881	411 331 750
4.	R i a u	610 150 463	655 884 682	764 546 115	822 150 500
5.	J a m b i	246 152 088	281 727 567	311 123 600	336 930 550
6.	Sumatera Selatan	413 657 153	511 334 752	650 294 156	763 800 585
7.	Bengkulu	80 647 318	93 346 379	115 792 924	132 094 436
8.	Lampung	350 772 072	468 358 783	507 987 600	490 630 000
9.	Bangka Belitung	106 887 357	172 164 295	173 574 904	189 999 842
10.	Kepulauan Riau	69 615 976	161 513 138	260 511 592	267 908 164
11.	DKI Jakarta	5 497 782 460	6 513 811 209	6 482 649 163	8 334 270 000
12.	Jawa Barat	2 688 355 976	3 385 936 560	3 449 101 477	3 425 187 030
13.	Jawa Tengah	1 602 699 350	1 996 141 372	2 160 427 370	2 511 000 000
14.	D I Yogyakarta	307 572 364	360 119 664	374 563 344	378 916 439
15.	Jawa Timur	2 540 067 580	3 089 131 887	3 256 903 358	3 081 650 000
16.	Banten	797 040 184	1 037 938 696	1 071 092 401	1 229 850 000
17.	B a l i	508 913 728	663 349 780	638 538 480	629 011 000
18.	Nusa Tenggara Barat	126 439 285	146 983 510	190 480 828	251 860 020
19.	Nusa Tenggara Timur	76 778 923	85 548 574	101 615 740	112 744 822
20.	Kalimantan Barat	225 774 598	253 716 781	315 458 450	337 482 070
21.	Kalimantan Tengah	96 376 662	128 105 738	177 793 231	210 520 000
22.	Kalimantan Selatan	331 032 946	454 434 811	478 480 924	565 961 000
23.	Kalimantan Timur	520 787 406	694 849 783	787 649 943	732 500 000
24.	Sulawesi Utara	120 461 623	158 600 865	166 801 206	178 326 052
25.	Sulawesi Tengah	102 888 783	120 026 304	135 032 260	133 787 500
26.	Sulawesi Selatan	470 373 815	565 425 353	660 156 134	686 439 049
27.	Sulawesi Tenggara	64 903 900	74 062 029	85 577 499	118 108 140
28.	Gorontalo	30 415 448	37 409 805	44 707 905	44 425 000
29.	Sulawesi Barat	0	20 311 401	30 697 910	34 070 000
30.	M a l u k u	40 643 448	51 141 212	49 194 830	67 714 700
31.	Maluku Utara	14 556 486	24 466 676	24 157 692	21 500 025
32.	P a p u a	125 797 730	136 301 540	163 238 210	158 000 000
33.	Papua Barat	0	12 066 644	6 000 000	20 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>19 694 489 319</b>	<b>24 208 786 980</b>	<b>25 719 347 146</b>	<b>28 404 433 674</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI RETRIBUSI DAERAH  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT RETRIBUTION REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

TABEL  
TABLE 3.1.2

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3 854 846	969 245	6 942 878	8 817 364
2.	Sumatera Utara	23 756 055	18 852 328	11 714 728	10 706 010
3.	Sumatera Barat	8 105 734	9 405 448	10 785 842	33 168 443
4.	R i a u	15 313 192	30 285 178	29 658 738	32 096 714
5.	J a m b i	16 706 721	18 455 153	20 337 125	22 705 252
6.	Sumatera Selatan	4 707 561	4 011 299	5 575 681	10 111 153
7.	Bengkulu	13 010 042	14 801 112	31 378 589	35 981 573
8.	Lampung	32 608 275	48 488 536	65 250 545	68 822 859
9.	Bangka Belitung	660 951	638 049	942 895	854 290
10.	Kepulauan Riau	0	293 452	378 481	485 000
11.	DKI Jakarta	423 059 461	419 674 270	449 340 321	625 574 830
12.	Jawa Barat	24 812 621	26 385 982	31 369 856	28 510 638
13.	Jawa Tengah	146 643 880	194 158 778	265 390 090	287 385 600
14.	D I Yogyakarta	10 418 456	11 940 416	12 454 920	14 722 357
15.	Jawa Timur	175 966 812	212 083 421	261 665 588	206 119 870
16.	Banten	2 163 827	2 498 721	2 709 167	2 610 000
17.	B a l i	6 522 653	9 693 181	11 684 380	12 075 800
18.	Nusa Tenggara Barat	17 441 615	20 435 172	25 658 802	32 515 073
19.	Nusa Tenggara Timur	16 680 810	19 962 622	27 074 633	32 196 174
20.	Kalimantan Barat	13 329 030	20 281 089	31 908 130	31 670 911
21.	Kalimantan Tengah	7 544 962	11 253 605	17 528 750	27 328 720
22.	Kalimantan Selatan	3 742 071	34 085 148	43 047 603	54 673 931
23.	Kalimantan Timur	99 531 156	105 479 111	108 608 509	120 650 500
24.	Sulawesi Utara	8 066 437	8 056 513	8 255 493	4 919 698
25.	Sulawesi Tengah	8 327 098	9 572 370	15 732 897	15 176 530
26.	Sulawesi Selatan	45 106 409	48 464 701	55 478 976	54 947 765
27.	Sulawesi Tenggara	8 023 779	10 438 365	12 251 122	17 164 244
28.	Gorontalo	1 361 184	2 779 488	85 662	0
29.	Sulawesi Barat	0	238 435	659 882	785 000
30.	M a l u k u	9 046 859	16 277 689	17 170 940	25 144 620
31.	Maluku Utara	0	515 181	5 020 490	12 751 461
32.	P a p u a	9 158 310	14 001 020	15 485 140	16 329 360
33.	Papua Barat	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 155 670 807</b>	<b>1 344 475 078</b>	<b>1 601 546 853</b>	<b>1 847 001 740</b>

\*) Data APBD

**TABEL 3.1.3**  
**TABLE**

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN  
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SELURUH INDONESIA  
ACTUAL REVENUE FROM PROVINCIAL GOVERNMENT CORPORATE INCOME  
AND MANAGEMENT OF SEPARATED PROVINCIAL GOVERNMENT WEALTH THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 832 377	11 735	18 493 041	40 010 000
2.	Sumatera Utara	0	8 523 503	90 291 200	52 676 439
3.	Sumatera Barat	26 063 960	25 812 650	25 574 011	29 397 400
4.	R i a u	36 620 058	25 144 359	45 790 566	48 714 293
5.	J a m b i	3 772 748	2 262 249	2 724 207	2 707 269
6.	Sumatera Selatan	13 695 674	26 002 990	21 209 406	24 559 640
7.	Bengkulu	2 926 170	4 085 561	4 620 305	804 000
8.	Lampung	4 107 141	7 300 728	7 488 182	9 619 943
9.	Bangka Belitung	93 407	137 019	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11.	DKI Jakarta	102 057 272	103 219 808	131 903 430	139 351 196
12.	Jawa Barat	69 060 296	88 205 800	111 998 489	115 486 000
13.	Jawa Tengah	12 808 250	207 047 862	93 747 350	100 853 670
14.	D I Yogyakarta	13 813 584	11 859 586	11 217 079	12 371 830
15.	Jawa Timur	50 418 648	51 814 077	61 252 024	66 897 980
16.	Banten	0	9 355 693	13 201 473	16 102 000
17.	B a l i	21 352 432	35 305 176	40 839 900	43 050 000
18.	Nusa Tenggara Barat	12 429 055	10 810 826	23 281 278	19 573 747
19.	Nusa Tenggara Timur	8 894 561	13 433 344	10 500 472	13 731 500
20.	Kalimantan Barat	12 447 293	10 465 919	10 471 627	11 615 000
21.	Kalimantan Tengah	2 944 860	4 559 545	7 096 250	9 015 000
22.	Kalimantan Selatan	9 447 877	9 408 311	9 313 381	13 157 000
23.	Kalimantan Timur	54 682 598	31 693 813	29 999 189	32 325 000
24.	Sulawesi Utara	6 320 256	24 686 526	24 905 230	26 700 000
25.	Sulawesi Tengah	246 337	915 498	1 340 739	3 810 647
26.	Sulawesi Selatan	33 229 651	40 871 344	37 178 147	41 964 682
27.	Sulawesi Tenggara	5 845 180	5 407 636	5 350 427	9 790 000
28.	Gorontalo	255 625	290 678	0	1 175 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	600 000	500 000	500 000	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	2 500 000
32.	P a p u a	11 147 090	16 417 810	12 212 880	20 550 000
33.	Papua Barat	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>517 112 400</b>	<b>775 550 046</b>	<b>852 500 283</b>	<b>908 509 236</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI LAIN-LAIN P.A.D. YANG SAH

SELURUH INDONESIA

TABEL 3.1.4  
TABLE

ACTUAL PROVINCIAL GOV. REVENUE FROM OTHER PROVINCIAL GOV. ORIGINAL REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	54 487 358	83 666 576	141 860 959	207 263 718
2.	Sumatera Utara	30 943 866	33 304 361	34 157 224	20 322 995
3.	Sumatera Barat	33 590 731	37 094 004	49 429 809	17 418 000
4.	R i a u	44 390 793	58 247 483	124 672 871	87 262 609
5.	J a m b i	19 301 403	42 435 770	50 857 900	19 739 169
6.	Sumatera Selatan	61 072 159	49 511 799	64 878 250	87 478 230
7.	Bengkulu	8 337 292	9 932 543	13 308 971	22 224 221
8.	Lampung	23 194 600	25 525 258	51 255 629	20 478 492
9.	Bangka Belitung	6 899 458	15 365 011	23 655 513	15 432 000
10.	Kepulauan Riau	0	465 200	20 940 773	13 133 355
11.	DKI Jakarta	407 435 615	561 162 630	753 564 686	985 059 224
12.	Jawa Barat	64 571 842	104 239 224	155 934 229	52 619 095
13.	Jawa Tengah	103 239 050	93 295 730	111 056 460	102 402 440
14.	D I Yogyakarta	15 599 821	17 992 672	38 246 752	14 557 800
15.	Jawa Timur	94 108 555	111 550 638	123 462 607	81 749 250
16.	Banten	19 042 363	20 444 659	31 020 240	20 500 000
17.	B a l i	22 892 745	34 537 937	38 275 400	28 780 020
18.	Nusa Tenggara Barat	13 913 011	17 937 174	25 604 476	25 291 717
19.	Nusa Tenggara Timur	21 336 076	21 684 531	36 760 985	33 180 413
20.	Kalimantan Barat	13 126 385	10 998 477	20 008 094	12 568 765
21.	Kalimantan Tengah	5 814 146	10 173 942	13 332 998	10 316 280
22.	Kalimantan Selatan	19 982 693	32 182 264	54 190 091	14 160 000
23.	Kalimantan Timur	30 630 047	65 493 111	270 737 875	109 330 000
24.	Sulawesi Utara	12 291 522	6 926 354	11 274 569	7 909 721
25.	Sulawesi Tengah	11 445 658	10 835 184	8 403 004	7 749 260
26.	Sulawesi Selatan	14 903 271	21 095 868	22 696 289	21 954 948
27.	Sulawesi Tenggara	12 770 373	11 161 193	17 453 706	17 327 732
28.	Gorontalo	5 789 665	5 633 015	9 321 644	4 900 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	4 032 445	4 178 880
30.	M a l u k u	7 018 009	9 438 914	12 214 400	7 445 070
31.	Maluku Utara	3 452 635	1 951 381	20 338 442	8 351 234
32.	P a p u a	15 998 730	31 906 340	23 649 600	17 280 000
33.	Papua Barat	0	721 282	6 143 880	2 500 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 197 579 872</b>	<b>1 556 910 525</b>	<b>2 382 740 771</b>	<b>2 100 864 638</b>

\*) Data APBD

**TABEL**  
**TABLE** 3.2

REALISASI PENDAPATAN PEMDA PROVINSI DARI DANA PERIMBANGAN  
SELURUH INDONESIA MENURUT PROVINSI  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT REVENUE FROM BALANCED BUDGET  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)*

No.	Provinsi/ <i>Province</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 205 286 145	2 169 014 546	2 312 771 517	1 952 237 600
2.	Sumatera Utara	512 975 463	518 391 297	782 842 712	921 810 784
3.	Sumatera Barat	296 263 749	310 066 307	554 231 885	621 337 720
4.	R i a u	1 248 715 798	1 783 743 461	2 489 065 459	2 635 973 002
5.	J a m b i	355 478 094	393 688 552	625 074 108	631 433 000
6.	Sumatera Selatan	575 979 889	786 818 756	1 124 255 237	1 308 290 346
7.	Bengkulu	239 606 415	254 143 754	391 160 410	454 916 665
8.	Lampung	410 775 132	496 229 872	662 966 877	672 630 170
9.	Bangka Belitung	209 951 010	246 999 992	336 000 327	347 785 000
10.	Kepulauan Riau	90 397 569	235 952 621	849 803 205	803 867 151
11.	DKI Jakarta	5 096 297 651	5 770 008 024	6 520 073 376	7 572 132 000
12.	Jawa Barat	1 197 663 954	1 220 120 700	1 298 795 160	1 522 066 853
13.	Jawa Tengah	789 076 690	807 132 660	1 185 860 720	1 379 482 000
14.	D I Yogyakarta	283 268 472	277 237 968	442 882 532	488 667 515
15.	Jawa Timur	862 509 974	909 866 655	1 376 748 105	1 558 200 000
16.	Banten	518 487 669	522 487 103	465 377 434	564 584 000
17.	B a l i	236 938 134	261 364 428	421 596 130	505 074 000
18.	Nusa Tenggara Barat	294 335 979	325 956 114	475 845 485	524 505 000
19.	Nusa Tenggara Timur	333 935 257	349 951 347	528 149 441	602 845 006
20.	Kalimantan Barat	346 854 224	378 683 287	669 251 793	684 800 660
21.	Kalimantan Tengah	349 214 595	372 614 589	673 708 294	675 765 000
22.	Kalimantan Selatan	301 858 881	388 055 704	594 962 169	558 469 000
23.	Kalimantan Timur	1 827 165 086	2 792 313 824	3 465 865 506	2 103 389 000
24.	Sulawesi Utara	244 934 087	275 479 569	442 355 948	488 228 347
25.	Sulawesi Tengah	282 135 368	309 461 557	521 910 355	537 049 716
26.	Sulawesi Selatan	446 743 220	476 672 728	677 865 697	758 011 899
27.	Sulawesi Tenggara	256 467 508	283 934 454	477 736 202	516 641 000
28.	Gorontalo	218 309 356	224 086 659	406 259 368	303 194 000
29.	Sulawesi Barat	0	79 170 071	283 882 465	302 053 000
30.	M a l u k u	307 584 789	321 525 302	477 886 900	515 393 750
31.	Maluku Utara	247 592 695	282 242 131	399 978 448	456 616 747
32.	P a p u a	575 324 060	684 333 580	1 192 188 830	1 864 060 000
33.	Papua Barat	0	269 964 622	527 046 422	554 871 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>20 162 126 913</b>	<b>24 777 712 234</b>	<b>33 654 398 517</b>	<b>35 386 380 931</b>

\*) *Data APBD*



TABEL  
TABLE 3.2.1

REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT TAX SHARE REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	49 823 969	84 435 412	120 084 184	79 995 293
2.	Sumatera Utara	186 674 985	202 359 849	240 832 727	262 763 784
3.	Sumatera Barat	56 160 415	57 640 621	71 452 737	69 270 199
4.	R i a u	229 700 245	246 733 407	328 546 801	331 831 573
5.	J a m b i	86 256 217	96 137 317	128 281 061	121 000 000
6.	Sumatera Selatan	165 974 360	199 251 316	253 337 292	258 093 346
7.	Bengkulu	16 416 992	22 783 785	7 488 738	40 576 020
8.	Lampung	44 496 312	65 505 385	78 287 508	56 805 891
9.	Bangka Belitung	17 567 679	22 744 322	24 467 423	16 350 000
10.	Kepulauan Riau	62 905 919	95 207 302	124 792 905	128 847 988
11.	DKI Jakarta	4 099 019 155	4 858 538 161	5 533 851 713	7 202 189 000
12.	Jawa Barat	487 502 308	542 261 596	601 796 182	487 107 640
13.	Jawa Tengah	232 479 050	254 490 500	291 714 804	324 935 481
14.	D I Yogyakarta	35 214 430	38 538 974	40 377 303	51 270 179
15.	Jawa Timur	395 124 932	448 439 925	529 628 905	452 856 769
16.	Banten	330 489 906	324 296 992	219 851 656	234 116 230
17.	B a l i	43 387 955	61 440 428	67 808 574	68 286 577
18.	Nusa Tenggara Barat	30 824 551	42 137 696	49 121 165	47 700 000
19.	Nusa Tenggara Timur	28 406 963	44 440 153	48 562 402	49 085 572
20.	Kalimantan Barat	50 283 393	63 014 510	74 546 267	68 885 134
21.	Kalimantan Tengah	52 656 870	63 165 174	88 646 309	76 714 457
22.	Kalimantan Selatan	65 198 855	89 080 855	100 918 609	85 000 000
23.	Kalimantan Timur	242 336 032	382 271 906	513 380 594	279 326 893
24.	Sulawesi Utara	23 440 739	26 666 660	36 737 091	39 824 664
25.	Sulawesi Tengah	22 220 624	36 732 242	41 372 066	32 052 431
26.	Sulawesi Selatan	122 970 335	128 032 224	150 047 282	141 146 829
27.	Sulawesi Tenggara	18 541 253	25 247 090	43 079 986	46 138 126
28.	Gorontalo	6 939 863	12 991 572	14 683 205	11 686 718
29.	Sulawesi Barat	0	13 650 000	18 479 769	12 500 000
30.	M a l u k u	21 917 376	39 149 293	48 625 067	36 269 069
31.	Maluku Utara	15 775 910	35 128 082	43 343 061	36 750 751
32.	P a p u a	128 813 600	133 245 000	191 712 117	119 340 787
33.	Papua Barat	0	114 059 185	155 005 422	75 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>7 369 521 193</b>	<b>8 869 816 934</b>	<b>10 280 860 925</b>	<b>11 343 717 401</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT NON TAX SHARE/NATURAL RESOURCES REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

TABEL  
TABLE 3.2.2

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 079 338 176	1 807 379 074	1 731 806 333	1 384 308 307
2.	Sumatera Utara	6 559 478	2 286 448	2 291 985	1 690 000
3.	Sumatera Barat	5 854 334	4 938 686	5 750 148	5 735 521
4.	R i a u	957 387 553	1 444 853 054	2 068 360 658	2 026 482 429
5.	J a m b i	45 874 877	53 933 235	122 432 047	95 415 000
6.	Sumatera Selatan	185 131 529	344 860 440	449 536 945	540 000 000
7.	Bengkulu	571 423	706 969	5 621 672	8 482 645
8.	Lampung	79 456 820	144 962 653	123 781 369	106 168 279
9.	Bangka Belitung	22 156 331	36 897 670	35 842 904	12 078 000
10.	Kepulauan Riau	24 778 650	104 782 319	546 679 310	341 689 163
11.	DKI Jakarta	89 722 496	138 445 963	213 197 563	250 000 000
12.	Jawa Barat	136 383 646	107 199 104	131 245 978	101 523 213
13.	Jawa Tengah	3 533 640	2 686 160	3 725 916	3 814 519
14.	D I Yogyakarta	5 042	6 994	21 229	18 336
15.	Jawa Timur	4 057 042	6 791 730	26 346 200	15 343 231
16.	Banten	134 763	172 111	231 778	173 770
17.	B a l i	744 459	0	481 556	254 423
18.	Nusa Tenggara Barat	31 974 428	33 931 418	22 579 320	29 247 000
19.	Nusa Tenggara Timur	54 294	37 419	151 039	170 434
20.	Kalimantan Barat	2 159 831	3 096 777	8 678 526	5 025 526
21.	Kalimantan Tengah	21 960 725	21 873 803	33 061 985	27 760 543
22.	Kalimantan Selatan	26 981 034	60 607 879	115 377 560	45 475 000
23.	Kalimantan Timur	1 318 054 054	2 144 449 918	2 879 936 912	1 566 954 107
24.	Sulawesi Utara	867 348	939 909	1 294 857	1 403 683
25.	Sulawesi Tengah	1 769 744	973 315	2 870 289	2 868 285
26.	Sulawesi Selatan	10 158 885	15 915 504	18 280 415	17 357 070
27.	Sulawesi Tenggara	2 667 505	4 525 364	8 302 216	8 661 874
28.	Gorontalo	654 493	82 095	186 163	113 282
29.	Sulawesi Barat	0	0	195 696	300 000
30.	M a l u k u	3 545 530	3 321 009	4 124 833	3 076 681
31.	Maluku Utara	15 876 785	17 884 154	18 030 703	34 141 996
32.	P a p u a	73 529 920	132 221 640	190 239 713	118 424 213
33.	Papua Barat	0	17 662 437	11 500 000	15 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 151 944 835</b>	<b>6 658 425 251</b>	<b>8 782 163 818</b>	<b>6 769 156 530</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI UMUM PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOV. GENERAL ALOCATION FUNDS REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

TABEL  
TABLE 3.2.3

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	76 124 000	271 147 000	460 881 000	487 934 000
2.	Sumatera Utara	319 741 000	313 745 000	539 718 000	657 357 000
3.	Sumatera Barat	234 249 000	247 487 000	477 029 000	546 332 000
4.	R i a u	61 628 000	92 157 000	92 158 000	277 659 000
5.	J a m b i	223 347 000	243 618 000	374 361 000	415 018 000
6.	Sumatera Selatan	224 874 000	242 707 000	421 381 000	510 197 000
7.	Bengkulu	222 618 000	230 653 000	378 050 000	405 858 000
8.	Lampung	286 822 000	285 761 834	460 898 000	509 656 000
9.	Bangka Belitung	170 227 000	187 358 000	275 690 000	319 357 000
10.	Kepulauan Riau	2 713 000	25 963 000	178 330 990	333 330 000
11.	DKI Jakarta	907 556 000	773 023 900	773 024 100	119 943 000
12.	Jawa Barat	573 778 000	570 660 000	565 753 000	933 436 000
13.	Jawa Tengah	553 064 000	549 956 000	890 420 000	1 050 732 000
14.	D I Yogyakarta	248 049 000	238 692 000	402 484 000	437 379 000
15.	Jawa Timur	463 328 000	454 635 000	820 773 000	1 090 000 000
16.	Banten	187 863 000	198 018 000	245 294 000	330 294 000
17.	B a l i	192 805 720	199 924 000	353 306 000	436 533 000
18.	Nusa Tenggara Barat	231 537 000	249 887 000	404 145 000	447 558 000
19.	Nusa Tenggara Timur	305 474 000	305 473 775	479 436 000	553 589 000
20.	Kalimantan Barat	294 411 000	312 572 000	586 027 000	610 890 000
21.	Kalimantan Tengah	274 597 000	287 575 612	552 000 000	571 290 000
22.	Kalimantan Selatan	209 678 992	238 366 970	378 666 000	427 994 000
23.	Kalimantan Timur	266 775 000	265 592 000	72 548 000	257 108 000
24.	Sulawesi Utara	220 626 000	247 873 000	404 324 000	447 000 000
25.	Sulawesi Tengah	258 145 000	271 756 000	477 668 000	502 129 000
26.	Sulawesi Selatan	313 614 000	332 725 000	509 538 000	599 508 000
27.	Sulawesi Tenggara	235 258 750	254 162 000	426 354 000	461 841 000
28.	Gorontalo	210 715 000	211 012 992	391 390 000	291 394 000
29.	Sulawesi Barat	0	65 520 071	255 207 000	279 253 000
30.	M a l u k u	272 417 750	279 055 000	425 137 000	476 048 000
31.	Maluku Utara	212 240 000	229 229 895	338 604 684	370 724 000
32.	P a p u a	369 929 580	418 866 940	810 237 000	876 295 000
33.	Papua Barat	0	128 243 000	350 541 000	464 871 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 624 205 792</b>	<b>9 223 416 989</b>	<b>14 571 373 774</b>	<b>16 498 507 000</b>

\*) Data APBD

TABEL  
TABLE 3.2.4

REALISASI PENDAPATAN DANA ALOKASI KHUSUS PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOV. SPECIAL ALOCATION FUNDS REVENUE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	6 053 060	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	10 000 000	0	0
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	0	0	0
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	10 000 000	10 000 000
30.	M a l u k u	9 704 133	0	0	0
31.	Maluku Utara	3 700 000	0	0	15 000 000
32.	P a p u a	3 050 960	0	0	750 000 000
33.	Papua Barat	0	10 000 000	10 000 000	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>16 455 093</b>	<b>26 053 060</b>	<b>20 000 000</b>	<b>775 000 000</b>

\*) Data APBD

TABEL  
TABLE 3.3

REALISASI PENERIMAAN LAINNYA PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT OTHERS RECEIPT  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	854 250 773	1 376 483 358	1 277 510 462	650 000 000
2.	Sumatera Utara	15 051 869	26 162 666	14 014 478	37 418 188
3.	Sumatera Barat	12 569 000	21 679 310	9 502 730	31 633 576
4.	R i a u	164 809 000	118 457 000	125 945 293	20 000 000
5.	J a m b i	8 525 000	10 251 502	0	29 500 000
6.	Sumatera Selatan	19 101 000	10 491 000	0	0
7.	Bengkulu	8 030 000	15 006 240	46 832	0
8.	Lampung	1 268 235	0	0	0
9.	Bangka Belitung	3 166 051	1 424 000	0	0
10.	Kepulauan Riau	32 133 000	23 600 000	0	30 000 000
11.	DKI Jakarta	19 693 856	109 058 000	0	653 057 000
12.	Jawa Barat	0	0	0	6 000 000
13.	Jawa Tengah	229 132 000	229 063 000	1 985 970	0
14.	D I Yogyakarta	14 945 000	20 429 000	1 780 223	2 322 585
15.	Jawa Timur	230 643 000	235 507 130	23 235 984	13 945 000
16.	Banten	9 241 968	5 381 742	4 501 278	2 175 000
17.	B a l i	9 938 965	8 832 000	0	1 356 980
18.	Nusa Tenggara Barat	7 728 000	6 899 000	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	8 710 000	7 645 000	0	55 000 000
20.	Kalimantan Barat	8 573 000	7 510 000	0	3 000 000
21.	Kalimantan Tengah	29 902 274	42 292 109	0	65 000 000
22.	Kalimantan Selatan	0	5 797 240	0	66 430 000
23.	Kalimantan Timur	0	0	184 560 000	0
24.	Sulawesi Utara	21 441 000	14 292 230	0	27 000 000
25.	Sulawesi Tengah	8 562 000	7 748 340	105 762	1 385 540
26.	Sulawesi Selatan	14 696 000	12 912 000	26 739 804	44 277 414
27.	Sulawesi Tenggara	13 344 000	7 384 000	0	17 800 000
28.	Gorontalo	0	35 757	416 965	122 597 710
29.	Sulawesi Barat	0	2 000 000	6 285 125	0
30.	M a l u k u	38 473 720	116 829 684	1 264 710	275 000
31.	Maluku Utara	6 983 174	0	0	0
32.	P a p u a	1 701 960 040	1 791 032 620	3 488 284 000	3 295 748 000
33.	Papua Barat	0	10 203 390	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 492 871 925</b>	<b>4 244 407 318</b>	<b>5 166 179 616</b>	<b>5 175 921 993</b>

\*) Data APBD

TABEL  
TABLE 3.B

REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PEMDA PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT FINANCING RECEIPT  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	648 774 102	1 273 509 253	1 877 160 961	1 914 946 604
2.	Sumatera Utara	218 599 416	245 738 114	217 937 578	275 674 150
3.	Sumatera Barat	140 544 128	151 883 991	147 708 192	212 782 693
4.	R i a u	497 409 054	614 741 025	831 884 360	799 489 371
5.	J a m b i	126 783 977	172 929 694	280 698 822	312 576 882
6.	Sumatera Selatan	190 918 717	23 850 581	259 900 775	150 000 000
7.	Bengkulu	41 736 234	54 431 176	75 951 032	55 050 000
8.	Lampung	174 907 941	239 524 645	410 233 213	305 418 535
9.	Bangka Belitung	85 822 132	131 521 138	227 005 972	289 085 320
10.	Kepulauan Riau	0	1 794 600	261 061 149	444 606 330
11.	DKI Jakarta	1 674 007 199	1 930 251 607	3 107 087 921	2 680 095 544
12.	Jawa Barat	668 422 609	875 138 566	1 000 895 099	419 179 953
13.	Jawa Tengah	383 353 110	542 577 294	814 829 550	156 674 060
14.	D I Yogyakarta	183 668 609	173 507 197	189 400 980	175 451 253
15.	Jawa Timur	502 424 620	841 134 877	1 245 199 284	250 795 060
16.	Banten	114 531 794	305 906 599	352 917 848	91 400 000
17.	B a l i	89 356 491	171 280 904	256 422 410	66 132 750
18.	Nusa Tenggara Barat	41 359 881	73 569 569	75 990 834	50 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	195 349 648	249 591 252	294 705 889	353 304 772
20.	Kalimantan Barat	68 124 432	68 123 430	62 788 210	0
21.	Kalimantan Tengah	59 130 610	87 619 190	93 808 130	105 000 000
22.	Kalimantan Selatan	12 740 105	89 959 275	195 626 451	40 450 000
23.	Kalimantan Timur	577 495 032	422 784 855	1 999 681 766	1 160 000 000
24.	Sulawesi Utara	22 976 748	28 326 171	66 024 839	93 891 739
25.	Sulawesi Tengah	51 966 320	48 434 844	47 204 072	5 500 000
26.	Sulawesi Selatan	129 920 740	220 273 327	190 188 442	120 943 319
27.	Sulawesi Tenggara	19 948 851	18 963 943	36 325 654	1 266 500
28.	Gorontalo	19 735 272	32 942 915	6 485 870	104 134 892
29.	Sulawesi Barat	0	0	22 243 637	29 533 700
30.	M a l u k u	29 394 487	35 303 443	32 908 750	31 739 340
31.	Maluku Utara	6 874 146	5 940 314	0	23 052 767
32.	P a p u a	121 381 080	170 033 230	0	673 618 030
33.	Papua Barat	0	1 020 752	0	73 626 342
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>7 097 657 485</b>	<b>9 302 607 771</b>	<b>14 680 277 690</b>	<b>11 465 419 906</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
THROUGHOUT INDONESIA BY KIND OF EXPENDITURE  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

TABEL 4  
TABLE

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>20 316 890 084</b>	<b>24 218 934 530</b>	<b>30 302 209 927</b>	<b>36 796 037 507</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	8 991 293 787	10 039 255 785	13 518 565 980	15 632 236 116
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	39 835 580	35 345 376	40 752 470	51 468 013
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	4 086 810	112 200 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	752 492 629	939 920 402	1 193 527 142	292 220 058
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	1 838 370 564	2 216 145 602	2 623 849 064	3 694 632 551
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	5 338 648 154	7 974 073 441	9 456 509 218	9 439 545 531
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 914 741 623	2 666 550 835	2 985 534 108	6 995 311 691
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	441 507 747	347 643 089	479 385 135	578 423 547
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>23 319 918 857</b>	<b>24 980 872 207</b>	<b>34 483 611 934</b>	<b>45 140 669 134</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	2 858 791 606	2 955 930 554	3 267 634 010	5 965 441 003
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	8 903 616 828	9 821 518 567	13 052 752 803	16 216 859 460
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	11 557 510 423	12 203 423 086	18 163 225 121	22 958 368 671
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>9 680 699 780</b>	<b>17 010 643 215</b>	<b>19 271 169 015</b>	<b>3 351 825 477</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>53 317 508 721</b>	<b>66 210 449 952</b>	<b>84 056 990 876</b>	<b>85 288 532 118</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

**TABEL 4.1** PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM MENURUT JENIS PENGELUARAN  
**TABLE** ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE

OF NANGROE ACEH DARUSSALAM BY KIND OF EXPENDITURE

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1 149 533 165</b>	<b>1 412 780 704</b>	<b>1 398 426 616</b>	<b>1 978 905 619</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	244 212 776	230 672 049	293 320 751	381 573 413
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	32 766 921	42 682 704	39 454 055	129 738 468
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	118 298 827	154 097 901	142 441 470	280 963 778
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	711 144 438	926 347 859	856 276 108	1 123 304 117
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	41 260 203	53 746 185	49 680 661	13 325 843
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 850 000	5 234 006	17 253 571	50 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>813 733 279</b>	<b>756 999 255</b>	<b>1 044 295 070</b>	<b>2 068 285 557</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	225 730 291	204 988 278	68 234 346	257 430 848
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	197 862 694	207 094 510	405 757 818	665 871 612
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	390 140 294	344 916 467	570 302 906	1 144 983 097
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>943 476 978</b>	<b>2 911 347 186</b>	<b>3 501 631 088</b>	<b>1 033 099 110</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 906 743 422</b>	<b>5 081 127 145</b>	<b>5 944 352 774</b>	<b>5 080 290 286</b>

\*) Data APBD



**TABEL** 4.2  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF NORTH SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>826 341 945</b>	<b>1 123 318 343</b>	<b>1 141 191 439</b>	<b>1 371 068 148</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	347 708 762	336 975 684	397 105 569	440 225 436
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6 717 036	17 762 480	2 350 000	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	51 724 577	91 144 499	58 701 881	191 335 027
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	105 224	242 252 004	503 891 118	550 052 250
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	408 809 224	416 049 873	173 899 877	179 455 435
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	11 277 122	19 133 803	5 242 994	10 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>730 611 863</b>	<b>707 255 991</b>	<b>1 043 477 391</b>	<b>1 346 790 418</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	20 306 618	33 161 831	40 214 134	143 168 675
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	242 699 787	271 112 125	380 441 834	445 850 827
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	467 605 458	402 982 035	622 821 423	757 770 916
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>325 744 774</b>	<b>321 535 777</b>	<b>332 734 153</b>	<b>20 000 000</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 882 698 582</b>	<b>2 152 110 111</b>	<b>2 517 402 983</b>	<b>2 737 858 566</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.3  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF WEST SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>350 121 839</b>	<b>411 027 112</b>	<b>473 347 800</b>	<b>706 728 132</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	202 599 280	212 695 445	259 153 610	327 826 709
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	5 321 107	7 220 983	7 735 933	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	17 967 983	25 107 098	26 568 615	57 201 852
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	107 359 893	150 423 309	159 000 112	182 879 907
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	14 332 356	15 005 492	18 095 520	125 782 745
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 541 220	574 785	2 794 010	13 036 919
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>306 220 935</b>	<b>334 521 524</b>	<b>486 741 857</b>	<b>645 079 110</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	11 972 083	12 474 882	26 375 304	84 739 924
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	159 338 384	176 327 820	211 989 645	286 605 933
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	134 910 468	145 718 822	248 376 908	273 733 253
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>168 108 991</b>	<b>186 359 990</b>	<b>246 282 693</b>	<b>5 262 340</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>824 451 765</b>	<b>931 908 626</b>	<b>1 206 372 350</b>	<b>1 357 069 582</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI R I A U MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF R I A U BY KIND OF EXPENDITURE  
 2004 - 2007  
 (000 rupiah)

**TABEL** 4.4  
**TABLE**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>617 381 131</b>	<b>830 508 589</b>	<b>1 124 359 639</b>	<b>1 184 484 995</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	229 729 992	301 584 290	539 720 723	500 085 013
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	542 129	397 350	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	0	0	121 328 816	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	170 480 179	30 200 650	178 114 586	312 270 292
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	214 706 831	253 599 040	241 504 410	325 479 690
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	242 199 167	33 942 840	36 650 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 922 000	2 528 092	9 748 264	10 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1 354 973 202</b>	<b>1 607 216 239</b>	<b>2 046 737 108</b>	<b>3 003 207 067</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	120 482 549	146 810 725	143 766 806	495 971 327
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	428 274 876	395 296 416	495 316 699	726 294 256
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	806 215 777	1 065 109 098	1 407 653 603	1 780 941 484
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>645 054 025</b>	<b>848 778 360</b>	<b>1 240 466 655</b>	<b>257 994 427</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 617 408 358</b>	<b>3 286 503 188</b>	<b>4 411 563 402</b>	<b>4 445 686 489</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI JAMBI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF JAMBI BY KIND OF EXPENDITURE  
 2004 - 2007  
 (000 rupiah)

**TABEL** 4.5  
**TABLE**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>267 608 091</b>	<b>270 876 027</b>	<b>300 037 903</b>	<b>404 196 944</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	132 104 467	138 561 736	156 235 881	219 380 830
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	1 473 112	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	18 442 224	0	4 450 288	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	35 298 560	0	509 472	21 525 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	78 824 705	130 841 179	136 562 362	142 416 114
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	0	2 119 900	15 875 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 938 135	0	160 000	5 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>393 321 926</b>	<b>371 956 994</b>	<b>663 200 977</b>	<b>887 403 686</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	15 344 649	11 784 580	16 921 125	75 657 828
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	94 449 928	103 227 275	229 481 162	346 848 267
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	283 527 349	256 945 139	416 798 690	464 897 591
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>115 790 014</b>	<b>278 917 466</b>	<b>327 576 882</b>	<b>63 991 492</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>776 720 031</b>	<b>921 750 487</b>	<b>1 290 815 762</b>	<b>1 355 592 122</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.6  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF SOUTH SUMATERA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>382 625 195</b>	<b>539 796 388</b>	<b>647 652 735</b>	<b>826 595 132</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	154 769 091	145 113 510	283 421 602	377 717 136
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	1 499 043	3 544 671	3 241 932	2 700 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	8 714 750	26 511 088	10 739 384	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	32 871 610	43 187 949	44 761 510	61 496 940
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	108 153 468	222 446 867	0	310 403 169
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	75 071 868	97 235 293	300 896 689	57 320 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 545 365	1 757 010	4 591 618	16 957 887
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>758 469 479</b>	<b>557 621 566</b>	<b>1 093 934 464</b>	<b>1 476 344 822</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	61 731 911	63 800 856	29 493 132	146 679 706
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	150 406 408	153 746 838	217 446 367	411 369 708
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	546 331 160	340 073 872	846 994 965	918 295 408
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>138 037 479</b>	<b>314 603 223</b>	<b>384 526 306</b>	<b>41 300 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 279 132 153</b>	<b>1 412 021 177</b>	<b>2 126 113 505</b>	<b>2 344 239 954</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI BENGKULU MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF BENGKULU BY KIND OF EXPENDITURE

2004 - 2007  
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>164 745 547</b>	<b>192 771 470</b>	<b>205 133 918</b>	<b>306 415 006</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	106 999 080	105 553 623	138 983 281	216 330 196
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	205 548	0	170	2 000 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	726 896	1 058 041	782 138	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	32 527 933	72 976 809	46 230 942	11 753 275
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	7 499 565	8 677 898	7 088 775	53 031 535
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 443 342	3 097 391	1 989 696	9 300 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	15 343 183	1 407 708	10 058 916	14 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>175 116 748</b>	<b>180 739 062</b>	<b>299 740 344</b>	<b>394 655 889</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10 366 600	11 593 160	16 976 517	46 895 705
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	94 083 004	111 156 414	156 797 748	126 209 902
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	70 667 144	57 989 488	125 966 079	221 550 282
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>54 431 176</b>	<b>72 236 233</b>	<b>127 384 801</b>	<b>0</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>394 293 471</b>	<b>445 746 765</b>	<b>632 259 063</b>	<b>701 070 895</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI LAMPUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF LAMPUNG BY KIND OF EXPENDITURE

TABEL 4.8  
 TABLE

2004 - 2007  
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>394 167 441</b>	<b>472 548 362</b>	<b>744 321 160</b>	<b>788 308 130</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	160 049 414	206 891 839	240 080 143	279 098 920
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	26 382 754	28 975 973	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	23 732 687	61 356 086	143 971 514	102 410 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	111 823 215	172 389 677	347 855 666	379 397 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	63 479 775	500 000	7 790 923	10 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	8 699 596	2 434 787	4 622 914	17 402 210
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>356 941 310</b>	<b>392 717 825</b>	<b>596 735 505</b>	<b>767 291 869</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	53 333 164	39 276 318	48 909 055	119 594 708
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	163 651 495	179 048 113	221 318 598	345 096 307
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	139 956 651	174 393 394	326 507 852	302 600 854
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>246 524 645</b>	<b>420 161 635</b>	<b>364 125 381</b>	<b>12 000 000</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>997 633 396</b>	<b>1 285 427 822</b>	<b>1 705 182 046</b>	<b>1 567 599 999</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.9  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI BANGKA BELITUNG MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF BANGKA BELITUNG BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>141 763 482</b>	<b>169 977 744</b>	<b>238 813 954</b>	<b>150 045 921</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	45 925 251	50 351 426	60 707 612	140 071
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	457 969	192 463	273 584	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	14 355 691	23 032 497	30 812 297	26 344 359
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	11 906 872	10 289 985	18 292 841	13 984 569
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	38 773 114	60 249 299	81 606 202	69 404 896
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	30 344 585	25 700 074	46 187 440	35 172 026
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	162 000	933 978	5 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>152 166 891</b>	<b>170 265 788</b>	<b>224 567 864</b>	<b>615 497 839</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	5 230 549	3 819 669	3 999 323	138 896 713
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	35 785 048	43 284 813	66 614 952	174 426 475
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	111 151 294	123 161 306	153 953 589	302 174 651
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>119 549 993</b>	<b>228 005 972</b>	<b>297 797 793</b>	<b>77 612 692</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>413 480 366</b>	<b>568 249 504</b>	<b>761 179 611</b>	<b>843 156 452</b>

\*) Data APBD



**TABEL** 4.10  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF RIAU ISLANDS BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>99 859 745</b>	<b>220 182 375</b>	<b>349 993 823</b>	<b>346 384 828</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	48 351 494	106 625 369	132 180 748	139 786 155
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	4 086	7 510	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	20 800 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 600 000	3 527 466	60 292 017	500 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	8 950 000	19 731 763	23 569 673	51 827 800
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	28 931 183	63 783 604	105 409 322	109 230 873
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	8 700 000	19 180 597	27 406 263	21 240 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 322 982	7 326 066	1 135 800	3 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>90 492 200</b>	<b>199 480 142</b>	<b>562 314 908</b>	<b>1 190 382 572</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 254 936	2 740 255	4 450 870	211 582 909
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	53 615 761	118 041 193	364 212 832	375 004 587
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	35 621 503	78 698 694	193 651 206	603 795 076
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 794 600</b>	<b>3 956 494</b>	<b>480 386 469</b>	<b>23 232 600</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>192 146 545</b>	<b>423 619 011</b>	<b>1 392 695 200</b>	<b>1 560 000 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.11  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI DKI JAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF DKI JAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>4 049 535 032</b>	<b>4 190 358 092</b>	<b>5 161 132 609</b>	<b>7 245 365 956</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	3 309 093 130	3 746 903 513	4 852 091 962	6 320 345 329
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	35 750 649	26 550 217	30 333 767	46 024 985
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	69 089 845	133 608 370	51 434 854	85 401 750
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	211 167 809	19 081 750	58 426 032	1 575 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	244 435 948	253 313 792	126 304 443	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	161 931 763	1 800 000	41 547 082	771 018 892
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	18 065 888	9 100 450	994 469	21 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>7 443 738 240</b>	<b>8 257 206 441</b>	<b>10 000 445 187</b>	<b>13 705 384 044</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	1 163 345 115	1 119 075 388	1 262 784 199	1 659 813 831
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	2 471 614 160	2 827 539 066	3 305 610 261	4 500 495 871
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	3 808 778 965	4 310 591 987	5 432 050 727	7 545 074 342
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>1 727 060 242</b>	<b>2 959 621 015</b>	<b>2 283 041 101</b>	<b>38 789 794</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>13 220 333 514</b>	<b>15 407 185 548</b>	<b>17 444 618 897</b>	<b>20 989 539 794</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.12  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI JAWA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF WEST JAVA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>2 211 939 147</b>	<b>2 706 538 392</b>	<b>3 238 140 943</b>	<b>3 661 402 960</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	570 356 789	656 234 515	760 462 303	714 818 239
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	144 575	176 516	208 505	250 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	82 600 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	40 180 470	45 945 784	76 661 980	5 500 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	148 719 759	145 422 735	122 724 240	250 761 724
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	920 653 686	1 138 599 367	1 258 573 471	1 344 162 608
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	460 987 014	651 146 471	958 184 733	1 203 310 389
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	70 896 854	69 013 004	61 325 711	60 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>1 458 628 153</b>	<b>1 602 743 876</b>	<b>1 669 597 306</b>	<b>1 610 680 720</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	300 419 413	395 172 584	340 366 071	293 490 540
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	732 812 483	661 827 363	698 599 050	905 575 488
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	425 396 257	545 743 929	630 632 185	411 614 692
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>1 042 319 998</b>	<b>1 390 744 564</b>	<b>1 140 356 061</b>	<b>296 965 889</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 712 887 298</b>	<b>5 700 026 832</b>	<b>6 048 094 310</b>	<b>5 569 049 569</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.13**  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI JAWA TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF CENTRAL JAVA BY KIND OF EXPENDITURE*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1 360 627 589</b>	<b>1 790 394 112</b>	<b>2 156 977 594</b>	<b>2 546 786 490</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	385 160 491	559 299 366	1 213 837 542	710 772 750
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	84 748	114 851	136 632	4 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	60 597 136	0	26 111 160	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	219 292 100	354 793 287	247 372 010	297 766 990
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	478 164 844	756 672 934	532 088 623	972 658 770
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	165 555 500	92 170 766	111 053 627	494 283 980
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	51 772 770	27 342 908	26 378 000	71 300 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1 177 809 171</b>	<b>1 145 916 702</b>	<b>1 590 666 496</b>	<b>1 543 767 160</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	167 781 419	94 173 208	179 316 526	261 440 090
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	563 016 027	570 675 054	776 048 688	828 650 520
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	447 011 725	481 068 440	635 301 282	453 676 550
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>728 515 570</b>	<b>1 133 105 882</b>	<b>885 653 420</b>	<b>447 244 120</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 266 952 330</b>	<b>4 069 416 696</b>	<b>4 633 297 510</b>	<b>4 537 797 770</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.14  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF DI YOGYAKARTA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>384 893 823</b>	<b>364 032 208</b>	<b>612 328 879</b>	<b>617 185 170</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	217 309 627	186 023 923	234 893 501	278 589 077
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	64 028
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	58 660 560	38 806 756	50 060 048	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	6 606 926	2 518 900	3 249 338	66 460 055
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	96 961 242	131 458 995	169 579 842	146 413 405
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 341 177	2 674 344	3 449 857	80 600 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 014 291	2 549 290	151 096 293	45 058 605
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>254 345 028</b>	<b>312 166 318</b>	<b>238 301 369</b>	<b>450 205 750</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	21 436 956	31 153 262	19 518 207	66 511 646
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	101 216 792	112 502 003	124 035 643	261 718 289
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	131 691 280	168 511 053	94 747 519	121 975 815
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>190 047 455</b>	<b>196 887 977</b>	<b>219 915 582</b>	<b>19 618 859</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>829 286 306</b>	<b>873 086 503</b>	<b>1 070 545 830</b>	<b>1 087 009 779</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.15  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF EAST JAVA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1 640 472 583</b>	<b>1 957 014 484</b>	<b>2 417 365 677</b>	<b>2 935 548 160</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	526 652 879	584 673 261	641 156 212	875 502 270
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	4 000 000	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	12 679 406	9 801 332	7 424 126	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	36 562 430	86 353 307	107 631 971	727 563 310
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	2 311 675	1 032 474 504	1 389 540 714	1 301 062 350
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 018 940 103	232 187 154	242 809 736	6 857 050
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	43 326 090	11 524 926	24 802 918	24 563 180
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1 875 554 576</b>	<b>2 088 386 401</b>	<b>2 709 178 923</b>	<b>2 110 896 600</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	209 971 593	283 052 654	378 004 661	353 407 400
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	1 094 550 561	1 118 253 623	1 529 326 834	1 165 048 600
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	571 032 422	687 080 124	801 847 428	592 440 600
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>940 112 030</b>	<b>1 405 687 800</b>	<b>1 221 922 350</b>	<b>212 912 400</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>4 456 139 189</b>	<b>5 451 088 685</b>	<b>6 348 466 950</b>	<b>5 259 357 160</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI BANTEN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF BANTEN BY KIND OF EXPENDITURE  
 2004 - 2007  
 (000 rupiah)

**TABEL** 4.16  
**TABLE**

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>604 877 946</b>	<b>829 365 250</b>	<b>889 439 452</b>	<b>1 047 409 539</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	139 266 064	110 359 022	118 888 320	198 483 975
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	20 162 389	3 013 755	15 062 779	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	32 188 519	51 821 379	54 600 219	39 089 648
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	382 358 374	450 447 553	541 262 248	540 620 250
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	29 620 000	213 518 871	158 022 280	260 150 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 282 600	204 670	1 603 606	9 065 666
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>486 843 363</b>	<b>658 978 848</b>	<b>922 684 427</b>	<b>879 811 461</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	20 663 078	19 055 340	12 521 208	158 570 078
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	302 849 890	357 859 123	445 114 854	321 603 555
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	163 330 395	282 064 385	465 048 365	399 637 828
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>368 786 496</b>	<b>415 669 115</b>	<b>128 695 962</b>	<b>0</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 460 507 805</b>	<b>1 904 013 213</b>	<b>1 940 819 841</b>	<b>1 927 221 000</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI BALI MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF BALI BY KIND OF EXPENDITURE

**TABEL 4.17**  
**TABLE**

2004 - 2007  
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>428 768 865</b>	<b>544 251 251</b>	<b>765 920 737</b>	<b>704 772 500</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	204 873 316	210 199 989	250 271 342	313 101 850
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	1 810 854	1 231 695	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	2 700 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	12 994 356	16 014 789	27 020 387	18 975 880
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	30 165 094	58 856 179	82 918 308	2 595 650
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	108 443 000	178 353 317	267 134 635	236 587 500
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	68 409 311	77 373 760	135 788 730	124 811 620
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 883 788	1 642 363	1 555 640	6 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>235 865 380</b>	<b>296 926 728</b>	<b>449 553 363</b>	<b>552 427 940</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	31 782 721	17 990 579	32 459 058	49 158 840
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	110 715 479	140 851 569	187 619 351	286 090 680
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	93 367 180	138 084 580	229 474 954	217 178 420
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>231 280 903</b>	<b>343 185 427</b>	<b>191 882 600</b>	<b>28 280 110</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>895 915 148</b>	<b>1 184 363 406</b>	<b>1 407 356 700</b>	<b>1 285 480 550</b>

\*) Data APBD



REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
**TABEL 4.18** *ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
**TABLE** *OF WEST NUSA TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>228 047 005</b>	<b>254 803 984</b>	<b>321 569 672</b>	<b>397 133 334</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	140 820 698	140 800 006	169 962 442	271 130 514
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	39 496	96 569	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	972 666	2 453 460	3 163 155	20 258 701
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	327 500	50 556 438	53 581 242	14 436 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	39 510 816	50 192 129	62 544 566	66 658 119
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	42 998 332	10 357 400	24 250 000	24 650 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 377 497	347 982	8 068 267	0
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>200 479 871</b>	<b>263 104 781</b>	<b>409 921 989</b>	<b>488 612 223</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	16 056 178	16 651 301	60 169 754	129 631 567
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	107 817 780	137 691 498	199 653 404	195 310 743
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	76 605 913	108 761 982	150 098 831	163 669 913
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>85 119 950</b>	<b>84 682 600</b>	<b>85 370 042</b>	<b>18 000 000</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>513 646 826</b>	<b>602 591 365</b>	<b>816 861 703</b>	<b>903 745 557</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.19  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF EAST NUSA TENGGARA BY KIND OF EXPENDITURE*  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>210 760 845</b>	<b>213 281 834</b>	<b>299 230 479</b>	<b>388 753 041</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	122 080 805	122 335 962	158 801 873	208 171 010
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	13 604	7 492	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	16 570 273	13 187 617	19 359 483	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	5 186 843	4 351 480	6 387 993	33 994 125
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	19 231 786	220 722	324 021	56 488 998
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	46 000 359	66 788 851	98 046 346	78 098 908
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 690 779	6 383 598	16 303 271	12 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>178 781 044</b>	<b>230 693 612</b>	<b>338 060 789</b>	<b>647 340 895</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	19 661 563	22 205 910	30 300 377	62 676 539
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	99 037 133	127 161 093	178 113 895	248 916 100
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	60 082 348	81 326 609	129 646 517	335 748 256
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>272 143 386</b>	<b>303 841 224</b>	<b>361 515 892</b>	<b>166 908 751</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>661 685 275</b>	<b>747 816 670</b>	<b>998 807 160</b>	<b>1 203 002 687</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.20  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF WEST KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>312 913 135</b>	<b>345 289 991</b>	<b>393 629 184</b>	<b>504 790 603</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	167 820 488	162 953 591	202 369 420	238 601 849
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	224 639	175 821	277 365	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	0	62 556 388	1 348 426	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	0	0	105 850 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	67 306 382	92 708 157	117 396 871	135 838 754
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	74 912 778	21 998 249	69 275 491	20 500 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 648 848	4 897 785	2 961 611	4 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>283 730 233</b>	<b>341 462 665</b>	<b>559 068 627</b>	<b>576 346 803</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	7 836 276	9 034 240	15 577 765	70 715 611
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	167 352 676	193 529 971	253 608 317	254 332 168
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	108 541 281	138 898 454	289 882 545	251 299 024
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>91 585 594</b>	<b>63 026 327</b>	<b>157 188 493</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>688 228 962</b>	<b>749 778 983</b>	<b>1 109 886 304</b>	<b>1 081 137 406</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.21  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF CENTRAL KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>128 561 235</b>	<b>252 346 065</b>	<b>262 960 344</b>	<b>365 563 270</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	84 474 529	110 787 083	137 224 469	181 715 830
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	45 200	90 000	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	2 056 935	23 607 749	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	2 978 612	23 202 827	0	46 577 750
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	30 338 252	19 530 679	75 719 308	110 957 140
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	5 710 605	73 277 084	47 811 850	13 498 480
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	2 957 102	1 850 643	2 204 717	12 814 070
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>346 570 622</b>	<b>285 798 947</b>	<b>577 552 853</b>	<b>717 381 730</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	9 235 806	6 114 967	14 606 083	52 965 450
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	60 420 002	89 782 625	157 190 273	194 213 110
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	276 914 814	189 901 355	405 756 497	470 203 170
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>75 796 252</b>	<b>118 473 706</b>	<b>142 754 456</b>	<b>20 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>550 928 109</b>	<b>656 618 718</b>	<b>983 267 653</b>	<b>1 102 945 000</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.22  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF SOUTH KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>281 654 657</b>	<b>472 492 600</b>	<b>543 390 092</b>	<b>606 056 202</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	149 053 776	179 003 935	217 450 475	262 098 595
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	16 736	23 762	42 770	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	17 395 603	18 860 983	27 140 220	52 657 607
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	107 803 843	226 400 297	259 894 883	280 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	7 384 699	47 903 623	37 461 744	8 300 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	300 000	1 400 000	3 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>303 676 704</b>	<b>324 240 844</b>	<b>587 468 553</b>	<b>656 652 391</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	18 027 260	25 059 771	22 336 543	102 510 284
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	103 157 731	139 193 492	202 668 510	231 999 844
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	182 491 713	159 987 581	362 463 500	322 142 263
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>93 473 212</b>	<b>217 189 309</b>	<b>244 761 974</b>	<b>50 592 338</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>678 804 573</b>	<b>1 013 922 753</b>	<b>1 375 620 619</b>	<b>1 313 300 931</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.23  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF EAST KALIMANTAN BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>1 150 851 963</b>	<b>953 036 152</b>	<b>1 657 923 745</b>	<b>1 693 439 450</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	108 479 294	124 660 555	184 428 387	345 595 016
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	53 836	98 632	81 287	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	3 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	0	0	203 473 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	1 003 948 358	824 509 465	1 473 414 071	354 550 428
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	0	0	781 821 006
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	38 370 475	3 767 500	0	5 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>1 478 154 506</b>	<b>1 140 431 579</b>	<b>2 110 862 576</b>	<b>2 419 755 050</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	151 197 764	155 062 729	205 537 068	184 407 395
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	386 849 143	403 223 794	380 079 752	615 014 379
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	940 107 599	582 145 056	1 525 245 756	1 620 333 276
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>481 284 856</b>	<b>2 019 146 766</b>	<b>3 078 316 467</b>	<b>145 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>3 110 291 325</b>	<b>4 112 614 497</b>	<b>6 847 102 788</b>	<b>4 258 194 500</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.24  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SULAWESI UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF NORTH SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>242 607 459</b>	<b>285 670 661</b>	<b>386 911 713</b>	<b>390 309 884</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	156 494 385	151 492 532	205 437 418	255 659 884
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	29 617	24 444	35 366	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	15 129 514	20 945 000	33 195 700	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	29 277 186	59 846 859	70 345 465	55 700 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	34 740 816	49 594 826	68 075 601	65 950 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	2 750 000	2 500 000	6 785 000	7 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	4 185 941	1 267 000	3 037 163	6 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG <i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>164 825 009</b>	<b>179 682 559</b>	<b>262 846 459</b>	<b>388 528 533</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	23 995 046	20 591 926	30 727 453	59 089 755
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	74 292 673	76 437 214	120 059 294	181 859 831
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	66 537 290	82 653 419	112 059 712	147 578 947
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH <i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>29 059 205</b>	<b>51 015 008</b>	<b>69 859 113</b>	<b>48 137 140</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>436 491 673</b>	<b>516 368 228</b>	<b>719 617 285</b>	<b>826 975 557</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.25  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF CENTRAL SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>222 135 658</b>	<b>245 611 041</b>	<b>326 222 473</b>	<b>350 248 036</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	146 455 130	141 377 423	186 800 509	210 945 809
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	61 180	0	42 920	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	8 148 800	6 797 708	9 385 432	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	22 417 500	34 498 572	47 631 349	32 843 709
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	35 057 494	42 036 854	58 039 274	59 521 129
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	4 399 719	17 522 569	24 192 989	42 937 389
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	5 595 835	3 377 915	130 000	4 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>195 001 061</b>	<b>212 078 945</b>	<b>326 709 495</b>	<b>345 611 157</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	14 274 205	18 160 516	24 732 846	56 467 489
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	105 070 296	111 682 264	159 919 607	181 703 939
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	75 656 560	82 236 165	142 057 042	107 439 729
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>48 434 845</b>	<b>49 304 111</b>	<b>76 797 121</b>	<b>8 600 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>465 571 564</b>	<b>506 994 097</b>	<b>729 729 089</b>	<b>704 459 193</b>

\*) Data APBD



**TABEL** 4.26  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF SOUTH SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>563 797 566</b>	<b>638 907 653</b>	<b>768 576 855</b>	<b>967 028 803</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	291 110 026	285 151 672	321 126 077	333 642 609
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	676 129	555 000	806 495	425 000
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	0	0	68 284 300
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	166 617 929	230 218 650	265 250 709	329 747 596
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	92 268 065	113 647 488	164 483 843	219 929 298
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	13 125 417	9 334 843	16 909 731	15 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>374 838 004</b>	<b>527 043 977</b>	<b>623 764 418</b>	<b>750 810 273</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	31 243 914	42 242 364	37 519 665	104 530 674
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	165 003 990	189 458 577	270 639 263	344 382 587
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	178 590 100	295 343 036	315 605 490	301 897 012
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>216 337 536</b>	<b>219 763 691</b>	<b>277 962 216</b>	<b>10 700 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 154 973 106</b>	<b>1 385 715 321</b>	<b>1 670 303 489</b>	<b>1 728 539 076</b>

\*) Data APBD

TABEL 4.27  
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF SOUTHEAST SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b>INDIRECT EXPENDITURE</b>	<b>158 799 579</b>	<b>163 028 549</b>	<b>203 921 733</b>	<b>269 575 953</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	114 271 962	115 511 959	147 549 024	176 896 940
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	32 490	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	1 000 000	1 642 500	1 419 890	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	2 000 000	7 977 836	11 048 117	23 226 350
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	20 000 000	27 224 666	31 759 212	46 452 663
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	18 058 919	8 865 592	10 920 000	18 000 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	3 468 698	1 805 996	1 193 000	5 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b>DIRECT EXPENDITURE</b>	<b>202 532 442</b>	<b>210 357 111</b>	<b>357 276 559</b>	<b>415 521 663</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	50 601 556	54 128 053	33 602 815	75 975 763
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	52 329 112	64 482 719	135 476 597	160 019 520
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	99 601 774	91 746 339	188 197 147	179 526 380
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>	<b>19 971 570</b>	<b>37 965 960</b>	<b>73 496 318</b>	<b>13 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>381 303 591</b>	<b>411 351 620</b>	<b>634 694 610</b>	<b>698 097 616</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.28  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI GORONTALO MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF GORONTALO BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>103 657 746</b>	<b>75 528 217</b>	<b>132 445 579</b>	<b>150 619 078</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	67 017 207	61 971 409	79 738 521	100 576 078
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	4 086 810	3 000 000
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	730 762	0	17 245 789	5 473 000
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	12 702 396	0	29 942 069	4 770 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	10 379 501	12 854 190	0	25 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	10 918 424	0	0	11 500 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	1 909 456	702 618	1 432 390	300 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>137 497 120</b>	<b>174 849 017</b>	<b>264 156 779</b>	<b>390 307 524</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	6 730 887	6 232 641	31 166 905	56 080 869
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	58 985 193	98 576 540	79 378 521	136 724 285
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	71 781 040	70 039 836	153 611 353	197 502 370
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>34 711 684</b>	<b>52 801 083</b>	<b>70 675 056</b>	<b>39 500 000</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>275 866 550</b>	<b>303 178 317</b>	<b>467 277 414</b>	<b>580 426 602</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.29  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI SULAWESI BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF WEST SULAWESI BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>16 071 276</b>	<b>81 759 700</b>	<b>89 873 110</b>
	<b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	5 770 097	30 461 215	50 011 230
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	0	0	0	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	0	0	15 991 330
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	9 801 179	51 048 485	19 370 550
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	0	0	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	500 000	250 000	4 500 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>75 648 631</b>	<b>192 023 417</b>	<b>266 787 470</b>
	<b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	3 981 253	16 494 189	48 850 660
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	0	10 494 495	100 648 153	135 561 490
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	0	61 172 883	74 881 075	82 375 320
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>74 018 347</b>	<b>13 960 000</b>
	<b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>101 719 907</b>	<b>347 801 464</b>	<b>370 620 580</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI MALUKU MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF MALUKU BY KIND OF EXPENDITURE

TABEL 4.30  
 TABLE

2004 - 2007  
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>198 052 476</b>	<b>279 007 238</b>	<b>198 435 228</b>	<b>269 748 350</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	128 166 796	123 043 162	129 286 128	175 001 800
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	100 000
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	6 956 684	431 809	1 811 673	27 900
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	15 888 547	14 339 423	7 411 959	33 937 290
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	20 256 382	28 875 430	12 047 220	32 000 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	13 459 962	99 055 865	27 589 108	0
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	13 324 105	13 261 549	20 289 140	28 681 360
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>195 123 859</b>	<b>234 100 255</b>	<b>342 780 472</b>	<b>366 457 730</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	11 492 339	12 194 324	13 850 482	49 302 440
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	90 135 622	104 267 041	161 358 380	180 310 200
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	93 495 898	117 638 890	167 571 610	136 845 090
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>39 584 977</b>	<b>37 908 751</b>	<b>49 924 830</b>	<b>11 506 400</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>432 761 312</b>	<b>551 016 244</b>	<b>591 140 530</b>	<b>647 712 480</b>

\*) Data APBD

**TABEL** 4.31  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROVINSI MALUKU UTARA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE*  
*OF NORTH MALUKU BY KIND OF EXPENDITURE*

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> <b><i>INDIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>103 523 184</b>	<b>151 836 781</b>	<b>169 649 309</b>	<b>147 423 485</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	40 762 398	81 257 826	84 939 264	92 682 485
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	13 229 652	19 621 406	21 867 709	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	23 005 276	34 120 009	30 179 158	44 191 000
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	6 064 403	8 994 349	8 742 535	5 500 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	1 896 255	2 812 409	17 927 290	550 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	18 565 200	5 030 782	5 993 353	4 500 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b> <b><i>DIRECT EXPENDITURE</i></b>	<b>166 255 358</b>	<b>130 911 324</b>	<b>257 686 004</b>	<b>369 283 329</b>
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	10 021 797	6 871 010	11 797 100	48 846 107
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	80 761 480	77 036 159	133 223 904	195 150 784
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	75 472 081	47 004 155	112 665 000	125 286 438
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b><i>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</i></b>	<b>9 680 594</b>	<b>32 367 578</b>	<b>22 159 759</b>	<b>8 065 420</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>279 459 136</b>	<b>315 115 683</b>	<b>449 495 072</b>	<b>524 772 234</b>

\*) Data APBD

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
 PROVINSI PAPUA MENURUT JENIS PENGELUARAN  
 ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
 OF PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE

TABEL 4.32  
 TABLE

2004 - 2007  
 (000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1 336 265 010</b>	<b>1 754 006 203</b>	<b>2 527 627 185</b>	<b>3 183 185 040</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	249 124 390	319 690 933	641 175 865	329 204 860
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grant Expenditure</i>	298 305 802	389 578 380	542 271 610	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	518 729 236	677 444 736	942 965 694	468 119 180
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	136 741 787	178 580 650	248 574 411	64 405 720
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	42 757 285	55 839 724	77 725 815	2 240 211 630
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	90 606 510	132 871 780	74 913 790	81 243 650
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1 027 621 280</b>	<b>907 020 307</b>	<b>1 390 393 235</b>	<b>2 673 708 400</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	47 263 370	60 672 957	84 160 014	261 671 020
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	355 461 220	401 431 580	590 163 760	608 611 020
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	624 896 690	444 915 770	716 069 461	1 803 426 360
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>196 880 750</b>	<b>182 999 630</b>	<b>977 038 240</b>	<b>188 691 950</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 560 767 040</b>	<b>2 844 026 140</b>	<b>4 895 058 660</b>	<b>6 045 585 390</b>

\*) Data APBD

**TABEL 4.33**  
**TABLE**

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
PROPINSI PAPUA BARAT MENURUT JENIS PENGELUARAN  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
OF WEST PAPUA BY KIND OF EXPENDITURE

2004 - 2007  
(000 rupiah)

No.	Jenis Pengeluaran <i>Kind of Expenditure</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>92 275 382</b>	<b>163 371 758</b>	<b>200 686 238</b>
	<b>INDIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	24 729 080	49 303 791	106 524 238
2.	Belanja Bunga <i>Interest Expenditure</i>	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi <i>Subsidies Expenditure</i>	0	0	0	0
4.	Belanja Hibah <i>Grand Expenditure</i>	0	1 136 367	10 738 013	0
5.	Belanja Bantuan Sosial <i>Social Aids Expenditure</i>	0	64 006 162	37 131 176	0
6.	Belanja Bagi Hasil <i>Sharing fund Expenditure</i>	0	0	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan <i>Financial Aids Expenditure</i>	0	2 396 543	66 198 778	83 162 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga <i>Unpredicted Expenditure</i>	0	7 230	0	11 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>0</b>	<b>102 347 953</b>	<b>240 867 150</b>	<b>419 451 459</b>
	<b>DIRECT EXPENDITURE</b>				
1.	Belanja Pegawai <i>Personnel Expenditure</i>	0	6 603 023	10 744 409	38 708 612
2.	Belanja Barang dan Jasa <i>Goods and Services Expenditure</i>	0	49 226 187	114 838 837	179 988 583
3.	Belanja Modal <i>Capital Expenditure</i>	0	46 518 743	115 283 904	200 754 264
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>99 353 355</b>	<b>134 951 394</b>	<b>30 859 645</b>
	<b>LOCAL GOVERNMENT FINANCING</b>				
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>293 976 690</b>	<b>539 190 302</b>	<b>650 997 342</b>

\*) Data APBD



REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A  
TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT INDIRECT EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 149 533 165	1 412 780 704	1 398 426 616	1 978 905 619
2.	Sumatera Utara	826 341 945	1 123 318 343	1 141 191 439	1 371 068 148
3.	Sumatera Barat	350 121 839	411 027 112	473 347 800	706 728 132
4.	R i a u	617 381 131	830 508 589	1 124 359 639	1 184 484 995
5.	J a m b i	267 608 091	270 876 027	300 037 903	404 196 944
6.	Sumatera Selatan	382 625 195	539 796 388	647 652 735	826 595 132
7.	Bengkulu	164 745 547	192 771 470	205 133 918	306 415 006
8.	Lampung	394 167 441	472 548 362	744 321 160	788 308 130
9.	Bangka Belitung	141 763 482	169 977 744	238 813 954	150 045 921
10.	Kepulauan Riau	99 859 745	220 182 375	349 993 823	346 384 828
11.	DKI Jakarta	4 049 535 032	4 190 358 092	5 161 132 609	7 245 365 956
12.	Jawa Barat	2 211 939 147	2 706 538 392	3 238 140 943	3 661 402 960
13.	Jawa Tengah	1 360 627 589	1 790 394 112	2 156 977 594	2 546 786 490
14.	D I Yogyakarta	384 893 823	364 032 208	612 328 879	617 185 170
15.	Jawa Timur	1 640 472 583	1 957 014 484	2 417 365 677	2 935 548 160
16.	Banten	604 877 946	829 365 250	889 439 452	1 047 409 539
17.	B a l i	428 768 865	544 251 251	765 920 737	704 772 500
18.	Nusa Tenggara Barat	228 047 005	254 803 984	321 569 672	397 133 334
19.	Nusa Tenggara Timur	210 760 845	213 281 834	299 230 479	388 753 041
20.	Kalimantan Barat	312 913 135	345 289 991	393 629 184	504 790 603
21.	Kalimantan Tengah	128 561 235	252 346 065	262 960 344	365 563 270
22.	Kalimantan Selatan	281 654 657	472 492 600	543 390 092	606 056 202
23.	Kalimantan Timur	1 150 851 963	953 036 152	1 657 923 745	1 693 439 450
24.	Sulawesi Utara	242 607 459	285 670 661	386 911 713	390 309 884
25.	Sulawesi Tengah	222 135 658	245 611 041	326 222 473	350 248 036
26.	Sulawesi Selatan	563 797 566	638 907 653	768 576 855	967 028 803
27.	Sulawesi Tenggara	158 799 579	163 028 549	203 921 733	269 575 953
28.	Gorontalo	103 657 746	75 528 217	132 445 579	150 619 078
29.	Sulawesi Barat	0	16 071 276	81 759 700	89 873 110
30.	M a l u k u	198 052 476	279 007 238	198 435 228	269 748 350
31.	Maluku Utara	103 523 184	151 836 781	169 649 309	147 423 485
32.	P a p u a	1 336 265 010	1 754 006 203	2 527 627 185	3 183 185 040
33.	Papua Barat	0	92 275 382	163 371 758	200 686 238
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>20 316 890 084</b>	<b>24 218 934 530</b>	<b>30 302 209 927</b>	<b>36 796 037 507</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.1

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT PERSONNEL INDIRECT EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	244 212 776	230 672 049	293 320 751	381 573 413
2.	Sumatera Utara	347 708 762	336 975 684	397 105 569	440 225 436
3.	Sumatera Barat	202 599 280	212 695 445	259 153 610	327 826 709
4.	R i a u	229 729 992	301 584 290	539 720 723	500 085 013
5.	J a m b i	132 104 467	138 561 736	156 235 881	219 380 830
6.	Sumatera Selatan	154 769 091	145 113 510	283 421 602	377 717 136
7.	Bengkulu	106 999 080	105 553 623	138 983 281	216 330 196
8.	Lampung	160 049 414	206 891 839	240 080 143	279 098 920
9.	Bangka Belitung	45 925 251	50 351 426	60 707 612	140 071
10.	Kepulauan Riau	48 351 494	106 625 369	132 180 748	139 786 155
11.	DKI Jakarta	3 309 093 130	3 746 903 513	4 852 091 962	6 320 345 329
12.	Jawa Barat	570 356 789	656 234 515	760 462 303	714 818 239
13.	Jawa Tengah	385 160 491	559 299 366	1 213 837 542	710 772 750
14.	D I Yogyakarta	217 309 627	186 023 923	234 893 501	278 589 077
15.	Jawa Timur	526 652 879	584 673 261	641 156 212	875 502 270
16.	Banten	139 266 064	110 359 022	118 888 320	198 483 975
17.	B a l i	204 873 316	210 199 989	250 271 342	313 101 850
18.	Nusa Tenggara Barat	140 820 698	140 800 006	169 962 442	271 130 514
19.	Nusa Tenggara Timur	122 080 805	122 335 962	158 801 873	208 171 010
20.	Kalimantan Barat	167 820 488	162 953 591	202 369 420	238 601 849
21.	Kalimantan Tengah	84 474 529	110 787 083	137 224 469	181 715 830
22.	Kalimantan Selatan	149 053 776	179 003 935	217 450 475	262 098 595
23.	Kalimantan Timur	108 479 294	124 660 555	184 428 387	345 595 016
24.	Sulawesi Utara	156 494 385	151 492 532	205 437 418	255 659 884
25.	Sulawesi Tengah	146 455 130	141 377 423	186 800 509	210 945 809
26.	Sulawesi Selatan	291 110 026	285 151 672	321 126 077	333 642 609
27.	Sulawesi Tenggara	114 271 962	115 511 959	147 549 024	176 896 940
28.	Gorontalo	67 017 207	61 971 409	79 738 521	100 576 078
29.	Sulawesi Barat	0	5 770 097	30 461 215	50 011 230
30.	M a l u k u	128 166 796	123 043 162	129 286 128	175 001 800
31.	Maluku Utara	40 762 398	81 257 826	84 939 264	92 682 485
32.	P a p u a	249 124 390	319 690 933	641 175 865	329 204 860
33.	Papua Barat	0	24 729 080	49 303 791	106 524 238
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 991 293 787</b>	<b>10 039 255 785</b>	<b>13 518 565 980</b>	<b>15 632 236 116</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA BUNGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.2

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT INTEREST EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	542 129	397 350	0	0
5.	J a m b i	0	1 473 112	0	0
6.	Sumatera Selatan	1 499 043	3 544 671	3 241 932	2 700 000
7.	Bengkulu	205 548	0	170	2 000 000
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	457 969	192 463	273 584	0
10.	Kepulauan Riau	4 086	7 510	0	0
11.	DKI Jakarta	35 750 649	26 550 217	30 333 767	46 024 985
12.	Jawa Barat	144 575	176 516	208 505	250 000
13.	Jawa Tengah	84 748	114 851	136 632	4 000
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	64 028
15.	Jawa Timur	0	0	4 000 000	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	1 810 854	1 231 695	0
18.	Nusa Tenggara Barat	39 496	96 569	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	13 604	7 492	0
20.	Kalimantan Barat	224 639	175 821	277 365	0
21.	Kalimantan Tengah	45 200	90 000	0	0
22.	Kalimantan Selatan	16 736	23 762	42 770	0
23.	Kalimantan Timur	53 836	98 632	81 287	0
24.	Sulawesi Utara	29 617	24 444	35 366	0
25.	Sulawesi Tengah	61 180	0	42 920	0
26.	Sulawesi Selatan	676 129	555 000	806 495	425 000
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	32 490	0
28.	Gorontalo	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	0	0	0
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	P a p u a	0	0	0	0
33.	Papua Barat	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>39 835 580</b>	<b>35 345 376</b>	<b>40 752 470</b>	<b>51 468 013</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT SUBSIDIES EXPENDITURE  
THROUGHOUT INDONESIA

TABEL 5.A.3  
TABLE

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0	0
2.	Sumatera Utara	0	0	0	0
3.	Sumatera Barat	0	0	0	0
4.	R i a u	0	0	0	0
5.	J a m b i	0	0	0	0
6.	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7.	Bengkulu	0	0	0	0
8.	Lampung	0	0	0	0
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0
10.	Kepulauan Riau	0	0	0	20 800 000
11.	DKI Jakarta	0	0	0	0
12.	Jawa Barat	0	0	0	82 600 000
13.	Jawa Tengah	0	0	0	0
14.	D I Yogyakarta	0	0	0	0
15.	Jawa Timur	0	0	0	0
16.	Banten	0	0	0	0
17.	B a l i	0	0	0	2 700 000
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19.	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21.	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	3 000 000
24.	Sulawesi Utara	0	0	0	0
25.	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
28.	Gorontalo	0	0	4 086 810	3 000 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	0	0	0	100 000
31.	Maluku Utara	0	0	0	0
32.	P a p u a	0	0	0	0
33.	Papua Barat	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 086 810</b>	<b>112 200 000</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA HIBAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT GRAND EXPENDITURE  
THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	32 766 921	42 682 704	39 454 055	129 738 468
2.	Sumatera Utara	6 717 036	17 762 480	2 350 000	0
3.	Sumatera Barat	5 321 107	7 220 983	7 735 933	0
4.	R i a u	0	0	121 328 816	0
5.	J a m b i	18 442 224	0	4 450 288	0
6.	Sumatera Selatan	8 714 750	26 511 088	10 739 384	0
7.	Bengkulu	726 896	1 058 041	782 138	0
8.	Lampung	26 382 754	28 975 973	0	0
9.	Bangka Belitung	14 355 691	23 032 497	30 812 297	26 344 359
10.	Kepulauan Riau	1 600 000	3 527 466	60 292 017	500 000
11.	DKI Jakarta	69 089 845	133 608 370	51 434 854	85 401 750
12.	Jawa Barat	40 180 470	45 945 784	76 661 980	5 500 000
13.	Jawa Tengah	60 597 136	0	26 111 160	0
14.	D I Yogyakarta	58 660 560	38 806 756	50 060 048	0
15.	Jawa Timur	12 679 406	9 801 332	7 424 126	0
16.	Banten	20 162 389	3 013 755	15 062 779	0
17.	B a l i	12 994 356	16 014 789	27 020 387	18 975 880
18.	Nusa Tenggara Barat	972 666	2 453 460	3 163 155	20 258 701
19.	Nusa Tenggara Timur	16 570 273	13 187 617	19 359 483	0
20.	Kalimantan Barat	0	62 556 388	1 348 426	0
21.	Kalimantan Tengah	2 056 935	23 607 749	0	0
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24.	Sulawesi Utara	15 129 514	20 945 000	33 195 700	0
25.	Sulawesi Tengah	8 148 800	6 797 708	9 385 432	0
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
27.	Sulawesi Tenggara	1 000 000	1 642 500	1 419 890	0
28.	Gorontalo	730 762	0	17 245 789	5 473 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	6 956 684	431 809	1 811 673	27 900
31.	Maluku Utara	13 229 652	19 621 406	21 867 709	0
32.	P a p u a	298 305 802	389 578 380	542 271 610	0
33.	Papua Barat	0	1 136 367	10 738 013	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>752 492 629</b>	<b>939 920 402</b>	<b>1 193 527 142</b>	<b>292 220 058</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.5

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT SOCIAL AIDS EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	118 298 827	154 097 901	142 441 470	280 963 778
2.	Sumatera Utara	51 724 577	91 144 499	58 701 881	191 335 027
3.	Sumatera Barat	17 967 983	25 107 098	26 568 615	57 201 852
4.	R i a u	170 480 179	30 200 650	178 114 586	312 270 292
5.	J a m b i	35 298 560	0	509 472	21 525 000
6.	Sumatera Selatan	32 871 610	43 187 949	44 761 510	61 496 940
7.	Bengkulu	32 527 933	72 976 809	46 230 942	11 753 275
8.	Lampung	23 732 687	61 356 086	143 971 514	102 410 000
9.	Bangka Belitung	11 906 872	10 289 985	18 292 841	13 984 569
10.	Kepulauan Riau	8 950 000	19 731 763	23 569 673	51 827 800
11.	DKI Jakarta	211 167 809	19 081 750	58 426 032	1 575 000
12.	Jawa Barat	148 719 759	145 422 735	122 724 240	250 761 724
13.	Jawa Tengah	219 292 100	354 793 287	247 372 010	297 766 990
14.	D I Yogyakarta	6 606 926	2 518 900	3 249 338	66 460 055
15.	Jawa Timur	36 562 430	86 353 307	107 631 971	727 563 310
16.	Banten	32 188 519	51 821 379	54 600 219	39 089 648
17.	B a l i	30 165 094	58 856 179	82 918 308	2 595 650
18.	Nusa Tenggara Barat	327 500	50 556 438	53 581 242	14 436 000
19.	Nusa Tenggara Timur	5 186 843	4 351 480	6 387 993	33 994 125
20.	Kalimantan Barat	0	0	0	105 850 000
21.	Kalimantan Tengah	2 978 612	23 202 827	0	46 577 750
22.	Kalimantan Selatan	17 395 603	18 860 983	27 140 220	52 657 607
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	203 473 000
24.	Sulawesi Utara	29 277 186	59 846 859	70 345 465	55 700 000
25.	Sulawesi Tengah	22 417 500	34 498 572	47 631 349	32 843 709
26.	Sulawesi Selatan	0	0	0	68 284 300
27.	Sulawesi Tenggara	2 000 000	7 977 836	11 048 117	23 226 350
28.	Gorontalo	12 702 396	0	29 942 069	4 770 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	15 991 330
30.	M a l u k u	15 888 547	14 339 423	7 411 959	33 937 290
31.	Maluku Utara	23 005 276	34 120 009	30 179 158	44 191 000
32.	P a p u a	518 729 236	677 444 736	942 965 694	468 119 180
33.	Papua Barat	0	64 006 162	37 131 176	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 838 370 564</b>	<b>2 216 145 602</b>	<b>2 623 849 064</b>	<b>3 694 632 551</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.6

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT SHARING FUND EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	711 144 438	926 347 859	856 276 108	1 123 304 117
2.	Sumatera Utara	105 224	242 252 004	503 891 118	550 052 250
3.	Sumatera Barat	107 359 893	150 423 309	159 000 112	182 879 907
4.	R i a u	214 706 831	253 599 040	241 504 410	325 479 690
5.	J a m b i	78 824 705	130 841 179	136 562 362	142 416 114
6.	Sumatera Selatan	108 153 468	222 446 867	0	310 403 169
7.	Bengkulu	7 499 565	8 677 898	7 088 775	53 031 535
8.	Lampung	111 823 215	172 389 677	347 855 666	379 397 000
9.	Bangka Belitung	38 773 114	60 249 299	81 606 202	69 404 896
10.	Kepulauan Riau	28 931 183	63 783 604	105 409 322	109 230 873
11.	DKI Jakarta	244 435 948	253 313 792	126 304 443	0
12.	Jawa Barat	920 653 686	1 138 599 367	1 258 573 471	1 344 162 608
13.	Jawa Tengah	478 164 844	756 672 934	532 088 623	972 658 770
14.	D I Yogyakarta	96 961 242	131 458 995	169 579 842	146 413 405
15.	Jawa Timur	2 311 675	1 032 474 504	1 389 540 714	1 301 062 350
16.	Banten	382 358 374	450 447 553	541 262 248	540 620 250
17.	B a l i	108 443 000	178 353 317	267 134 635	236 587 500
18.	Nusa Tenggara Barat	39 510 816	50 192 129	62 544 566	66 658 119
19.	Nusa Tenggara Timur	19 231 786	220 722	324 021	56 488 998
20.	Kalimantan Barat	67 306 382	92 708 157	117 396 871	135 838 754
21.	Kalimantan Tengah	30 338 252	19 530 679	75 719 308	110 957 140
22.	Kalimantan Selatan	107 803 843	226 400 297	259 894 883	280 000 000
23.	Kalimantan Timur	1 003 948 358	824 509 465	1 473 414 071	354 550 428
24.	Sulawesi Utara	34 740 816	49 594 826	68 075 601	65 950 000
25.	Sulawesi Tengah	35 057 494	42 036 854	58 039 274	59 521 129
26.	Sulawesi Selatan	166 617 929	230 218 650	265 250 709	329 747 596
27.	Sulawesi Tenggara	20 000 000	27 224 666	31 759 212	46 452 663
28.	Gorontalo	10 379 501	12 854 190	0	25 000 000
29.	Sulawesi Barat	0	9 801 179	51 048 485	19 370 550
30.	M a l u k u	20 256 382	28 875 430	12 047 220	32 000 000
31.	Maluku Utara	6 064 403	8 994 349	8 742 535	5 500 000
32.	P a p u a	136 741 787	178 580 650	248 574 411	64 405 720
33.	Papua Barat	0	0	0	0
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>5 338 648 154</b>	<b>7 974 073 441</b>	<b>9 456 509 218</b>	<b>9 439 545 531</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.7  
TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT FINANCIAL AIDS EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	41 260 203	53 746 185	49 680 661	13 325 843
2.	Sumatera Utara	408 809 224	416 049 873	173 899 877	179 455 435
3.	Sumatera Barat	14 332 356	15 005 492	18 095 520	125 782 745
4.	R i a u	0	242 199 167	33 942 840	36 650 000
5.	J a m b i	0	0	2 119 900	15 875 000
6.	Sumatera Selatan	75 071 868	97 235 293	300 896 689	57 320 000
7.	Bengkulu	1 443 342	3 097 391	1 989 696	9 300 000
8.	Lampung	63 479 775	500 000	7 790 923	10 000 000
9.	Bangka Belitung	30 344 585	25 700 074	46 187 440	35 172 026
10.	Kepulauan Riau	8 700 000	19 180 597	27 406 263	21 240 000
11.	DKI Jakarta	161 931 763	1 800 000	41 547 082	771 018 892
12.	Jawa Barat	460 987 014	651 146 471	958 184 733	1 203 310 389
13.	Jawa Tengah	165 555 500	92 170 766	111 053 627	494 283 980
14.	D I Yogyakarta	2 341 177	2 674 344	3 449 857	80 600 000
15.	Jawa Timur	1 018 940 103	232 187 154	242 809 736	6 857 050
16.	Banten	29 620 000	213 518 871	158 022 280	260 150 000
17.	B a l i	68 409 311	77 373 760	135 788 730	124 811 620
18.	Nusa Tenggara Barat	42 998 332	10 357 400	24 250 000	24 650 000
19.	Nusa Tenggara Timur	46 000 359	66 788 851	98 046 346	78 098 908
20.	Kalimantan Barat	74 912 778	21 998 249	69 275 491	20 500 000
21.	Kalimantan Tengah	5 710 605	73 277 084	47 811 850	13 498 480
22.	Kalimantan Selatan	7 384 699	47 903 623	37 461 744	8 300 000
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	781 821 006
24.	Sulawesi Utara	2 750 000	2 500 000	6 785 000	7 000 000
25.	Sulawesi Tengah	4 399 719	17 522 569	24 192 989	42 937 389
26.	Sulawesi Selatan	92 268 065	113 647 488	164 483 843	219 929 298
27.	Sulawesi Tenggara	18 058 919	8 865 592	10 920 000	18 000 000
28.	Gorontalo	10 918 424	0	0	11 500 000
29.	Sulawesi Barat	0	0	0	0
30.	M a l u k u	13 459 962	99 055 865	27 589 108	0
31.	Maluku Utara	1 896 255	2 812 409	17 927 290	550 000
32.	P a p u a	42 757 285	55 839 724	77 725 815	2 240 211 630
33.	Papua Barat	0	2 396 543	66 198 778	83 162 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 914 741 623</b>	<b>2 666 550 835</b>	<b>2 985 534 108</b>	<b>6 995 311 691</b>

\*) Data APBD



REALISASI BELANJA TAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.A.8

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT UNPREDICTED EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1 850 000	5 234 006	17 253 571	50 000 000
2.	Sumatera Utara	11 277 122	19 133 803	5 242 994	10 000 000
3.	Sumatera Barat	2 541 220	574 785	2 794 010	13 036 919
4.	R i a u	1 922 000	2 528 092	9 748 264	10 000 000
5.	J a m b i	2 938 135	0	160 000	5 000 000
6.	Sumatera Selatan	1 545 365	1 757 010	4 591 618	16 957 887
7.	Bengkulu	15 343 183	1 407 708	10 058 916	14 000 000
8.	Lampung	8 699 596	2 434 787	4 622 914	17 402 210
9.	Bangka Belitung	0	162 000	933 978	5 000 000
10.	Kepulauan Riau	3 322 982	7 326 066	1 135 800	3 000 000
11.	DKI Jakarta	18 065 888	9 100 450	994 469	21 000 000
12.	Jawa Barat	70 896 854	69 013 004	61 325 711	60 000 000
13.	Jawa Tengah	51 772 770	27 342 908	26 378 000	71 300 000
14.	D I Yogyakarta	3 014 291	2 549 290	151 096 293	45 058 605
15.	Jawa Timur	43 326 090	11 524 926	24 802 918	24 563 180
16.	Banten	1 282 600	204 670	1 603 606	9 065 666
17.	B a l i	3 883 788	1 642 363	1 555 640	6 000 000
18.	Nusa Tenggara Barat	3 377 497	347 982	8 068 267	0
19.	Nusa Tenggara Timur	1 690 779	6 383 598	16 303 271	12 000 000
20.	Kalimantan Barat	2 648 848	4 897 785	2 961 611	4 000 000
21.	Kalimantan Tengah	2 957 102	1 850 643	2 204 717	12 814 070
22.	Kalimantan Selatan	0	300 000	1 400 000	3 000 000
23.	Kalimantan Timur	38 370 475	3 767 500	0	5 000 000
24.	Sulawesi Utara	4 185 941	1 267 000	3 037 163	6 000 000
25.	Sulawesi Tengah	5 595 835	3 377 915	130 000	4 000 000
26.	Sulawesi Selatan	13 125 417	9 334 843	16 909 731	15 000 000
27.	Sulawesi Tenggara	3 468 698	1 805 996	1 193 000	5 000 000
28.	Gorontalo	1 909 456	702 618	1 432 390	300 000
29.	Sulawesi Barat	0	500 000	250 000	4 500 000
30.	M a l u k u	13 324 105	13 261 549	20 289 140	28 681 360
31.	Maluku Utara	18 565 200	5 030 782	5 993 353	4 500 000
32.	P a p u a	90 606 510	132 871 780	74 913 790	81 243 650
33.	Papua Barat	0	7 230	0	11 000 000
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>441 507 747</b>	<b>347 643 089</b>	<b>479 385 135</b>	<b>578 423 547</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA

**TABEL 5.B**  
**TABLE**

*ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT DIRECT EXPENDITURE  
THROUGHOUT INDONESIA*

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/ <i>Province</i>	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	813 733 279	756 999 255	1 044 295 070	2 068 285 557
2.	Sumatera Utara	730 611 863	707 255 991	1 043 477 391	1 346 790 418
3.	Sumatera Barat	306 220 935	334 521 524	486 741 857	645 079 110
4.	R i a u	1 354 973 202	1 607 216 239	2 046 737 108	3 003 207 067
5.	J a m b i	393 321 926	371 956 994	663 200 977	887 403 686
6.	Sumatera Selatan	758 469 479	557 621 566	1 093 934 464	1 476 344 822
7.	Bengkulu	175 116 748	180 739 062	299 740 344	394 655 889
8.	Lampung	356 941 310	392 717 825	596 735 505	767 291 869
9.	Bangka Belitung	152 166 891	170 265 788	224 567 864	615 497 839
10.	Kepulauan Riau	90 492 200	199 480 142	562 314 908	1 190 382 572
11.	DKI Jakarta	7 443 738 240	8 257 206 441	10 000 445 187	13 705 384 044
12.	Jawa Barat	1 458 628 153	1 602 743 876	1 669 597 306	1 610 680 720
13.	Jawa Tengah	1 177 809 171	1 145 916 702	1 590 666 496	1 543 767 160
14.	D I Yogyakarta	254 345 028	312 166 318	238 301 369	450 205 750
15.	Jawa Timur	1 875 554 576	2 088 386 401	2 709 178 923	2 110 896 600
16.	Banten	486 843 363	658 978 848	922 684 427	879 811 461
17.	B a l i	235 865 380	296 926 728	449 553 363	552 427 940
18.	Nusa Tenggara Barat	200 479 871	263 104 781	409 921 989	488 612 223
19.	Nusa Tenggara Timur	178 781 044	230 693 612	338 060 789	647 340 895
20.	Kalimantan Barat	283 730 233	341 462 665	559 068 627	576 346 803
21.	Kalimantan Tengah	346 570 622	285 798 947	577 552 853	717 381 730
22.	Kalimantan Selatan	303 676 704	324 240 844	587 468 553	656 652 391
23.	Kalimantan Timur	1 478 154 506	1 140 431 579	2 110 862 576	2 419 755 050
24.	Sulawesi Utara	164 825 009	179 682 559	262 846 459	388 528 533
25.	Sulawesi Tengah	195 001 061	212 078 945	326 709 495	345 611 157
26.	Sulawesi Selatan	374 838 004	527 043 977	623 764 418	750 810 273
27.	Sulawesi Tenggara	202 532 442	210 357 111	357 276 559	415 521 663
28.	Gorontalo	137 497 120	174 849 017	264 156 779	390 307 524
29.	Sulawesi Barat	0	75 648 631	192 023 417	266 787 470
30.	M a l u k u	195 123 859	234 100 255	342 780 472	366 457 730
31.	Maluku Utara	166 255 358	130 911 324	257 686 004	369 283 329
32.	P a p u a	1 027 621 280	907 020 307	1 390 393 235	2 673 708 400
33.	Papua Barat	0	102 347 953	240 867 150	419 451 459
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>23 319 918 857</b>	<b>24 980 872 207</b>	<b>34 483 611 934</b>	<b>45 140 669 134</b>

\*) *Data APBD*

REALISASI BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.B.1

TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT PERSONNEL DIRECT EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	225 730 291	204 988 278	68 234 346	257 430 848
2.	Sumatera Utara	20 306 618	33 161 831	40 214 134	143 168 675
3.	Sumatera Barat	11 972 083	12 474 882	26 375 304	84 739 924
4.	R i a u	120 482 549	146 810 725	143 766 806	495 971 327
5.	J a m b i	15 344 649	11 784 580	16 921 125	75 657 828
6.	Sumatera Selatan	61 731 911	63 800 856	29 493 132	146 679 706
7.	Bengkulu	10 366 600	11 593 160	16 976 517	46 895 705
8.	Lampung	53 333 164	39 276 318	48 909 055	119 594 708
9.	Bangka Belitung	5 230 549	3 819 669	3 999 323	138 896 713
10.	Kepulauan Riau	1 254 936	2 740 255	4 450 870	211 582 909
11.	DKI Jakarta	1 163 345 115	1 119 075 388	1 262 784 199	1 659 813 831
12.	Jawa Barat	300 419 413	395 172 584	340 366 071	293 490 540
13.	Jawa Tengah	167 781 419	94 173 208	179 316 526	261 440 090
14.	D I Yogyakarta	21 436 956	31 153 262	19 518 207	66 511 646
15.	Jawa Timur	209 971 593	283 052 654	378 004 661	353 407 400
16.	Banten	20 663 078	19 055 340	12 521 208	158 570 078
17.	B a l i	31 782 721	17 990 579	32 459 058	49 158 840
18.	Nusa Tenggara Barat	16 056 178	16 651 301	60 169 754	129 631 567
19.	Nusa Tenggara Timur	19 661 563	22 205 910	30 300 377	62 676 539
20.	Kalimantan Barat	7 836 276	9 034 240	15 577 765	70 715 611
21.	Kalimantan Tengah	9 235 806	6 114 967	14 606 083	52 965 450
22.	Kalimantan Selatan	18 027 260	25 059 771	22 336 543	102 510 284
23.	Kalimantan Timur	151 197 764	155 062 729	205 537 068	184 407 395
24.	Sulawesi Utara	23 995 046	20 591 926	30 727 453	59 089 755
25.	Sulawesi Tengah	14 274 205	18 160 516	24 732 846	56 467 489
26.	Sulawesi Selatan	31 243 914	42 242 364	37 519 665	104 530 674
27.	Sulawesi Tenggara	50 601 556	54 128 053	33 602 815	75 975 763
28.	Gorontalo	6 730 887	6 232 641	31 166 905	56 080 869
29.	Sulawesi Barat	0	3 981 253	16 494 189	48 850 660
30.	M a l u k u	11 492 339	12 194 324	13 850 482	49 302 440
31.	Maluku Utara	10 021 797	6 871 010	11 797 100	48 846 107
32.	P a p u a	47 263 370	60 672 957	84 160 014	261 671 020
33.	Papua Barat	0	6 603 023	10 744 409	38 708 612
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>2 858 791 606</b>	<b>2 955 930 554</b>	<b>3 267 634 010</b>	<b>5 965 441 003</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.B.2

TABLE ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT GOODS AND SERVICES EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	197 862 694	207 094 510	405 757 818	665 871 612
2.	Sumatera Utara	242 699 787	271 112 125	380 441 834	445 850 827
3.	Sumatera Barat	159 338 384	176 327 820	211 989 645	286 605 933
4.	R i a u	428 274 876	395 296 416	495 316 699	726 294 256
5.	J a m b i	94 449 928	103 227 275	229 481 162	346 848 267
6.	Sumatera Selatan	150 406 408	153 746 838	217 446 367	411 369 708
7.	Bengkulu	94 083 004	111 156 414	156 797 748	126 209 902
8.	Lampung	163 651 495	179 048 113	221 318 598	345 096 307
9.	Bangka Belitung	35 785 048	43 284 813	66 614 952	174 426 475
10.	Kepulauan Riau	53 615 761	118 041 193	364 212 832	375 004 587
11.	DKI Jakarta	2 471 614 160	2 827 539 066	3 305 610 261	4 500 495 871
12.	Jawa Barat	732 812 483	661 827 363	698 599 050	905 575 488
13.	Jawa Tengah	563 016 027	570 675 054	776 048 688	828 650 520
14.	D I Yogyakarta	101 216 792	112 502 003	124 035 643	261 718 289
15.	Jawa Timur	1 094 550 561	1 118 253 623	1 529 326 834	1 165 048 600
16.	Banten	302 849 890	357 859 123	445 114 854	321 603 555
17.	B a l i	110 715 479	140 851 569	187 619 351	286 090 680
18.	Nusa Tenggara Barat	107 817 780	137 691 498	199 653 404	195 310 743
19.	Nusa Tenggara Timur	99 037 133	127 161 093	178 113 895	248 916 100
20.	Kalimantan Barat	167 352 676	193 529 971	253 608 317	254 332 168
21.	Kalimantan Tengah	60 420 002	89 782 625	157 190 273	194 213 110
22.	Kalimantan Selatan	103 157 731	139 193 492	202 668 510	231 999 844
23.	Kalimantan Timur	386 849 143	403 223 794	380 079 752	615 014 379
24.	Sulawesi Utara	74 292 673	76 437 214	120 059 294	181 859 831
25.	Sulawesi Tengah	105 070 296	111 682 264	159 919 607	181 703 939
26.	Sulawesi Selatan	165 003 990	189 458 577	270 639 263	344 382 587
27.	Sulawesi Tenggara	52 329 112	64 482 719	135 476 597	160 019 520
28.	Gorontalo	58 985 193	98 576 540	79 378 521	136 724 285
29.	Sulawesi Barat	0	10 494 495	100 648 153	135 561 490
30.	M a l u k u	90 135 622	104 267 041	161 358 380	180 310 200
31.	Maluku Utara	80 761 480	77 036 159	133 223 904	195 150 784
32.	P a p u a	355 461 220	401 431 580	590 163 760	608 611 020
33.	Papua Barat	0	49 226 187	114 838 837	179 988 583
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>8 903 616 828</b>	<b>9 821 518 567</b>	<b>13 052 752 803</b>	<b>16 216 859 460</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
SELURUH INDONESIA  
ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE  
THROUGHOUT INDONESIA  
2004 - 2007  
(000 rupiah)

TABEL 5.B.3  
TABLE

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	390 140 294	344 916 467	570 302 906	1 144 983 097
2.	Sumatera Utara	467 605 458	402 982 035	622 821 423	757 770 916
3.	Sumatera Barat	134 910 468	145 718 822	248 376 908	273 733 253
4.	R i a u	806 215 777	1 065 109 098	1 407 653 603	1 780 941 484
5.	J a m b i	283 527 349	256 945 139	416 798 690	464 897 591
6.	Sumatera Selatan	546 331 160	340 073 872	846 994 965	918 295 408
7.	Bengkulu	70 667 144	57 989 488	125 966 079	221 550 282
8.	Lampung	139 956 651	174 393 394	326 507 852	302 600 854
9.	Bangka Belitung	111 151 294	123 161 306	153 953 589	302 174 651
10.	Kepulauan Riau	35 621 503	78 698 694	193 651 206	603 795 076
11.	DKI Jakarta	3 808 778 965	4 310 591 987	5 432 050 727	7 545 074 342
12.	Jawa Barat	425 396 257	545 743 929	630 632 185	411 614 692
13.	Jawa Tengah	447 011 725	481 068 440	635 301 282	453 676 550
14.	D I Yogyakarta	131 691 280	168 511 053	94 747 519	121 975 815
15.	Jawa Timur	571 032 422	687 080 124	801 847 428	592 440 600
16.	Banten	163 330 395	282 064 385	465 048 365	399 637 828
17.	B a l i	93 367 180	138 084 580	229 474 954	217 178 420
18.	Nusa Tenggara Barat	76 605 913	108 761 982	150 098 831	163 669 913
19.	Nusa Tenggara Timur	60 082 348	81 326 609	129 646 517	335 748 256
20.	Kalimantan Barat	108 541 281	138 898 454	289 882 545	251 299 024
21.	Kalimantan Tengah	276 914 814	189 901 355	405 756 497	470 203 170
22.	Kalimantan Selatan	182 491 713	159 987 581	362 463 500	322 142 263
23.	Kalimantan Timur	940 107 599	582 145 056	1 525 245 756	1 620 333 276
24.	Sulawesi Utara	66 537 290	82 653 419	112 059 712	147 578 947
25.	Sulawesi Tengah	75 656 560	82 236 165	142 057 042	107 439 729
26.	Sulawesi Selatan	178 590 100	295 343 036	315 605 490	301 897 012
27.	Sulawesi Tenggara	99 601 774	91 746 339	188 197 147	179 526 380
28.	Gorontalo	71 781 040	70 039 836	153 611 353	197 502 370
29.	Sulawesi Barat	0	61 172 883	74 881 075	82 375 320
30.	M a l u k u	93 495 898	117 638 890	167 571 610	136 845 090
31.	Maluku Utara	75 472 081	47 004 155	112 665 000	125 286 438
32.	P a p u a	624 896 690	444 915 770	716 069 461	1 803 426 360
33.	Papua Barat	0	46 518 743	115 283 904	200 754 264
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>11 557 510 423</b>	<b>12 203 423 086</b>	<b>18 163 225 121</b>	<b>22 958 368 671</b>

\*) Data APBD

REALISASI BELANJA PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

SELURUH INDONESIA

TABEL 5.C  
TABLE

ACTUAL LOCAL PROVINCIAL GOVERNMENT FINANCING EXPENDITURE

THROUGHOUT INDONESIA

2004 - 2007

(000 rupiah)

No.	Provinsi/Province	2004	2005	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	943 476 978	2 911 347 186	3 501 631 088	1 033 099 110
2.	Sumatera Utara	325 744 774	321 535 777	332 734 153	20 000 000
3.	Sumatera Barat	168 108 991	186 359 990	246 282 693	5 262 340
4.	R i a u	645 054 025	848 778 360	1 240 466 655	257 994 427
5.	J a m b i	115 790 014	278 917 466	327 576 882	63 991 492
6.	Sumatera Selatan	138 037 479	314 603 223	384 526 306	41 300 000
7.	Bengkulu	54 431 176	72 236 233	127 384 801	0
8.	Lampung	246 524 645	420 161 635	364 125 381	12 000 000
9.	Bangka Belitung	119 549 993	228 005 972	297 797 793	77 612 692
10.	Kepulauan Riau	1 794 600	3 956 494	480 386 469	23 232 600
11.	DKI Jakarta	1 727 060 242	2 959 621 015	2 283 041 101	38 789 794
12.	Jawa Barat	1 042 319 998	1 390 744 564	1 140 356 061	296 965 889
13.	Jawa Tengah	728 515 570	1 133 105 882	885 653 420	447 244 120
14.	D I Yogyakarta	190 047 455	196 887 977	219 915 582	19 618 859
15.	Jawa Timur	940 112 030	1 405 687 800	1 221 922 350	212 912 400
16.	Banten	368 786 496	415 669 115	128 695 962	0
17.	B a l i	231 280 903	343 185 427	191 882 600	28 280 110
18.	Nusa Tenggara Barat	85 119 950	84 682 600	85 370 042	18 000 000
19.	Nusa Tenggara Timur	272 143 386	303 841 224	361 515 892	166 908 751
20.	Kalimantan Barat	91 585 594	63 026 327	157 188 493	0
21.	Kalimantan Tengah	75 796 252	118 473 706	142 754 456	20 000 000
22.	Kalimantan Selatan	93 473 212	217 189 309	244 761 974	50 592 338
23.	Kalimantan Timur	481 284 856	2 019 146 766	3 078 316 467	145 000 000
24.	Sulawesi Utara	29 059 205	51 015 008	69 859 113	48 137 140
25.	Sulawesi Tengah	48 434 845	49 304 111	76 797 121	8 600 000
26.	Sulawesi Selatan	216 337 536	219 763 691	277 962 216	10 700 000
27.	Sulawesi Tenggara	19 971 570	37 965 960	73 496 318	13 000 000
28.	Gorontalo	34 711 684	52 801 083	70 675 056	39 500 000
29.	Sulawesi Barat	0	10 000 000	74 018 347	13 960 000
30.	M a l u k u	39 584 977	37 908 751	49 924 830	11 506 400
31.	Maluku Utara	9 680 594	32 367 578	22 159 759	8 065 420
32.	P a p u a	196 880 750	182 999 630	977 038 240	188 691 950
33.	Papua Barat	0	99 353 355	134 951 394	30 859 645
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>9 680 699 780</b>	<b>17 010 643 215</b>	<b>19 271 169 015</b>	<b>3 351 825 477</b>

\*) Data APBD